

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

SKRIPSI



Oleh:

NISRINA SALSABILA

19520092

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

NISRINA SALSABILA

19520092

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SKRIPSI

Oleh

NISRINA SALSABILA

NIM : 19520092

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

LEMBAR PENGESAHAN**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH****SKRIPSI**

Oleh

NISRINA SALSABILA

NIM : 19520092

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 19751030201608012048

2 Anggota Penguji

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009

3 Sekretaris Penguji

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Salsabila

NIM : 19520092

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **"Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"** Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Juni 2023

Hormat saya,

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10.000', 'MUTU STAMPEL', and 'BEFADAK444646221'.

Nisrina Salsabila

NIM: 19520092

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. yang tidak pernah berhenti dalam memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang kedua, shalawat serta Salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya sampai berada di titik ini. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada saya hingga sampai saat ini. Walaupun beliau tidak sempat hadir pada saat saya lulus, tetapi doa saya selalu menyertainya. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberi dan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, umur yang berkah, rezeki yang lapang dan kebahagiaan kepada Ayah dan Umik. Karya ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberi dan doa-doa baik yang dipanjatkan.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berproses, berjuang, dan bertahan sejauh ini dalam melalui banyaknya rintangan. Terima kasih kepada diri saya untuk tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk terus bergerak meskipun jutaan kali ingin menyerah. Terima kasih untuk diri saya karena selalu menjadi manusia yang kuat. Terima kasih kepada diri saya karena memiliki semangat yang tinggi meskipun melelahkan. Terima kasih untuk selalu berusaha mengarungi derasnya ombak di lautan seorang diri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah *survive* atas perjuangan batin dan fisik yang tidak disaksikan prosesnya oleh siapapun. Terima kasih untuk tetap hidup.

MOTTO

“Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang paling penting ialah tidak berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik”

“Be better than you were yesterday”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya”

“Lillah, Billah, Fillah. Apapun yang terjadi, susah dan senang dijalani”

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu Din al-Islam.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., P.hD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Umik dan keluarga yang selalu memberikan doa serta dukungan moril.
7. Diri sendiri yang telah bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Mas Tatang dan Mas Akromul yang sudah membantu saya dalam memberikan informasi di BPPKAD Kota Probolinggo.
9. Seluruh pegawai bagian keuangan pada SKPD Kota Probolinggo yang telah membantu saya mengisi kuisisioner penelitian ini.

10. Teman-teman kos B4 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Lutfia yang selalu sigap membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan mau berjuang bersama
12. Seseorang yang pernah singgah dan mengajari saya untuk menyikapi proses hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran semoga perjalanan kita selalu dipermudah oleh Allah SWT.
13. Teman-teman akuntansi 2019 yang sudah banyak membantu saya dan memberikan semangat untuk saya
14. Dan seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi banyak pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 9 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Batasan Penelitian	12
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	19
2.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran	25
2.2.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.....	28
2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	30

2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis Penelitian	33
2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	33
2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	34
2.4.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35
2.4.4 Pengaruh Secara Simultan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.5 Data dan Jenis Data	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Definisi Operasional Variabel	42
3.8 Skala Pengukuran	43
3.9 Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Reliabilitas).....	44
3.9.1 Uji Validitas.....	44
3.9.2 Uji Reliabilitas	45
3.10 Analisis Data	45
3.10.1 Statistik Deskriptif	46
3.10.2 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.10.3 Analisis Regresi Linear Berganda	49
3.10.4 Uji Hipotesis (Uji Kelayakan Model).....	50
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53

4.1.1 Gambaran Umum.....	53
4.1.2. Tujuan Pemerintahan Kota Probolinggo.....	58
4.1.3 Hasil Karakteristik Responden	58
4.1.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	61
4.1.5 Analisis Data.....	62
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	67
4.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda	71
4.2 Pembahasan	77
4.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77
4.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	79
4.2.3 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80
4.5.4 Pengaruh Secara Simultan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	82
BAB V.....	84
KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Oprasional Variabel	43
Tabel 3.2 Skala Likert	44
Tabel 4.1 Perangkat Dearah Kota Probolinggo.....	55
Tabel 4.2 Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.3 Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.4 Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Tabel 4.5 Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	60
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.7 U ji Validitas Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1).....	63
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2).....	64
Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3)	64
Tabel 4.10 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	65
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas	66
Tabel 4.11 Uji Normalitas Data	67
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas.....	69
Tabel 4.14 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson.....	70
Tabel 4.15 Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 4.16 Uji Regresi Linear Berganda Secara Parsial (Uji T	74
Tabel 4.17 Uji Regresi Linear Berganda Secara Simultan (Uji F)	75
Tabel 4.18 U ji Koefisien Determinasi (R Square)	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Probolinggo	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	89
Lampiran 2. Rekap Data Jawaban Kuisisioner	95
Lampiran 3. Output SPSS	101
Lampiran 4. Surat Perizinan Penelitian.....	118
Lampiran 5. Bukti Konsultasi Bimbingan	121
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	122
Lampiran 7. Hasil Turnitin.....	123
Lampiran 8: Biodata Peneliti	124

ABSTRAK

Nisrina Salsabila 2023. SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA

Kata Kunci : Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah merupakan instansi sektor publik yang menerapkan akuntansi dalam pertanggungjawabannya sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Pelaporan Akuntansi Pemerintahan. Sehingga pemerintah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial dan secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer berupa angket/kuisisioner. Motivasi peneliti mengambil objek di Pemerintah Kota Probolinggo karena belum terciptanya kedisiplinan beberapa SKPD dalam melaksanakan pelaporan keuangannya sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, kualitas data (validitas dan reliabilitas), dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi). Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo, dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan secara simultan, Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

Nisrina Salsabila 2023. *THESIS*. Title : “*The Influence of Implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards, Clarity of Budget Targets and Supervision of Financial Report Quality of Reports on Performance Accountability of Government Agencies*”

Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA

Keywords : *Public Sector Accounting Reporting Standards, Budget Target Clarity, Financial Report Quality Monitoring, Government Agencies Performance Accountability*

The government is a public sector agency that applies accounting in its responsibilities according to Government Regulation No. 71 of 2010 Concerning Government Accounting Reporting Standards. Therefore, the government is required to account for the results of its performance properly and correctly. The purpose of this study was to find out whether the use of public sector accounting reporting standards, the clarity budget targets, and the supervision of financial reports had any simultaneous or partial effects on the performance accountability of government agencies. This study uses a quantitative approach by collecting primary data in the form of a questionnaire or questionnaire. The Probolinggo City Government became the object of research because the discipline of several SKPDs had not yet been created in carrying out their financial reporting in accordance with the SOPs set by the government.

Multiple linear regression analysis with the SPSS version 25 program was carried out to test the research hypothesis. The method used in this research is the quantitative research method. The analytical method used in this research are descriptive statistics, data quality (validity and reliability), and hypothesis testing (determination test and T-test). This research was conducted at the City Government of Probolinggo, East Java Province. The population in this study were 18 SKPD in Probolinggo City, with a total sample of 54 respondents using purposive sampling technique.

The results provided that the Application of Public Sector Accounting Reporting Standards did not have a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies, while the Clarity of Budget Targets and Quality Control of Financial Reports had a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies.

نبذة مختصر

نسرينا سلسبيل 2023 ، أطروحة. العنوان: "أثر تطبيق معايير إعداد التقارير المحاسبية للقطاع العام ، وضوح أهداف الميزانية والإشراف على جودة التقارير المالية على مساءلة أداء الجهات الحكومية
المستشار: يونا أوكثاني ليستاري

الكلمات المفتاحية: معايير إعداد التقارير المحاسبية للقطاع العام ، وضوح أهداف الميزانية ، مراقبة جودة التقارير المالية ، محاسبة أداء الجهات الحكومي

حكومة هي وكالة قطاع عام تطبق المحاسبة في مسؤولياتها وفقاً للائحة الحكومية رقم 71 لعام 2010 بشأن معايير إعداد التقارير المحاسبية الحكومية. حتى تكون الحكومة مطالبة بالمساءلة عن نتائج أداؤها بشكل صحيح وصحيح. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان هناك تأثير لتطبيق معايير إعداد التقارير المحاسبية للقطاع العام ، ووضوح أهداف الميزانية ، ومراقبة جودة التقارير المالية حول مساءلة الأداء للجهات الحكومية جزئياً وفي نفس الوقت. استخدمت هذه الدراسة المنهج الكمي من خلال جمع البيانات الأولية في شكل استبيان. كان دافع الباحث لأخذ الأشياء في حكومة مدينة بوربالينجا هو أن الانضباط في العديد من وحدات العمل لم يتم إنشاؤه بعد في تنفيذ تقاريرهم المالية وفقاً للمراحل التي حددتها الحكومة.

الطريقة. SPSS اختبار فرضية البحث باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام الإصدار الخامس والعشرون من برنامج المستخدمة هي طريقة البحث الكمي. الطريقة التحليلية المستخدمة هي الإحصاء الوصفي وجودة البيانات (الصلاحية والثوقية) تم إجراء هذا البحث في حكومة مدينة فوربالينجا ، مقاطعة جاوة الشرقية. كان (t اختبار التحديد واختبار) واختبار الفرضيات السكان في هذه الدراسة ثمانية عشر وحدة عمل في مدينة فوربالينجا ، مع عينة إجمالية من أربعة وخمسين مستجيباً باستخدام تقنية أخذ العينات الهادفة.

وأظهرت النتائج أن تطبيق معايير إعداد التقارير المحاسبية للقطاع العام لم يكن له تأثير كبير على مساءلة أداء الجهات الحكومية ، بينما كان لوضوح أهداف الموازنة وضبط جودة التقارير المالية تأثير كبير على مساءلة أداء الجهات الحكومي

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, perkembangan bidang akuntansi berkembang dengan sangat pesat. Hampir setiap sektor menggunakan akuntansi untuk mengelola keuangannya agar lebih efektif dan efisien, termasuk dalam suatu pemerintahan. Setiap pemerintahan berkeinginan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sebagai sebuah organisasi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap jasa dan pelayanan publik, pemerintah diharuskan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. Tercapainya pemerintahan yang baik dan akuntabel akan didukung oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi isu kebijakan strategis di Indonesia karena dengan meningkatkannya akan berdampak positif pada terciptanya *good governance*. Hal ini juga memiliki dampak di bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2020). Dalam bidang ekonomi, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi. Sementara dalam bidang politik, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memaparkan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dengan berbagai

peraturan perundangan yang telah dikeluarkan, diharapkan akan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Bastian, 2011).

Akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga atas program kerja dan kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Laporan yang disusun dan disampaikan melalui media pelaporan ini berisi informasi tentang kinerja lembaga pemerintah yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan keuangan tersebut didasarkan pada kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini dikirimkan kepada atasan dari masing-masing tenaga kerja. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih unggul, bersih, dan bertanggungjawab. (Rahmawati & Heliana, 2022). LAKIP merupakan bagian dari komitmen nyata pada setiap pemerintahan untuk membangun sistem akuntabilitas kerjanya.

Upaya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dilaporkan pada laporan keuangan yang terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan penyusunannya harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis yang digunakan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemennya. Kebijakan reformasi keuangan di tingkat nasional atau daerah dilakukan untuk mencapai *good governance* dan diimplementasikan melalui aturan standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2010. Salah satu prinsip *good governance* adalah pengelolaan keuangan yang baik dengan penyajian dan pelaporan laporan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan untuk mewujudkan *good governance*. Dengan meningkatkannya juga dapat mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mardiasmo, 2017).

Maksud dari kejelasan sasaran anggaran ialah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab atas sasaran anggaran tersebut. Anggaran dalam organisasi sektor publik ini mencakup rencana kegiatan yang dibentuk menjadi rencana perolehan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran dalam suatu entitas memiliki peran penting, karena merupakan media yang digunakan sebagai solusi pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja guna menjalankan roda entitas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Septiani et al., 2022). Pelaksana anggaran belum sepenuhnya bisa dikatakan tuntas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Permasalahan dalam pengelolaannya terkadang masih sering terjadi, misalnya daya serap anggaran yang lamban dan ketidakpatuhan

terhadap aturan formal. Di sisi lain, lambannya daya serap anggaran ini mengakibatkan efek negatif terhadap pencapaian sasaran program.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pada laporan keuangan instansi pemerintah, perlu diterapkan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal oleh pihak internal dan eksternal. Dengan cara ini, diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat berjalan secara optimal. Sehingga pengawasan kualitas laporan keuangan akan sangat bergantung pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan diharapkan pengawasannya yang baik akan dapat meminimalisir kasus korupsi, sehingga *good governance* dapat dicapai oleh suatu pemerintahan. (Rafarni Gea et al., 2021).

Salah satu dasar dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangannya. Maka dari itu, informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tentunya harus memiliki manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Pemerintah Daerah diharuskan untuk memperhatikan hasil informasi yang dituangkan pada laporan keuangan, dengan tujuan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Hasil informasi akuntansi yang tertuang pada laporan keuangan tersebut, harus memenuhi beberapa karakteristik sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Demi mewujudkan akuntabilitas kinerja Kota Probolinggo dalam 5 (lima) tahun ke depan, pemerintah Kota Probolinggo memiliki tujuan yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas”. Target dalam mengukur keberhasilan tujuan ini adalah menerima penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pada tahun 2022, Kota Probolinggo mencapai opini WTP dalam lima tahun berturut-turut. Mempertahankan WTP merupakan sebuah reputasi dalam menunjukkan kinerja pemerintah atau *good governance* yang telah diterapkan di pemerintah Jawa Timur. Setiap tahunnya, laporan keuangan pada setiap pemerintahan akan mendapat penilaian berupa opini atas kewajaran informasi keuangannya. BPK akan memberikan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang akan di sampaikan oleh BPK ini memiliki beberapa pertimbangan kriteria, diantaranya yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dan pelaporannya, ketaatan terhadap peraturan, dan keefektifitasan dalam pengendalian internalnya. Berdasarkan Tanggapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ‘Pengelolaan Keuangan Daerah’ Pemerintah Kota Probolinggo disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian substansi

rancangan peraturan daerah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memberikan perintah dan memberikan kewenangan dan perlu dilakukan perbaikan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya.

Berdasarkan survey pada bulan Juli tahun 2022 di BPPKAD Kota Probolinggo sebagai SKPD, PPKD, dan Kuasa BUD yang mengatur seluruh pelaporan keuangan satuan kerja di pemerintahan Kota Probolinggo, diperoleh beberapa isu yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran OPD Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun beberapa isu lain yang teridentifikasi adalah (1) belum adanya penyusunan Laporan Keuangan SKPD per semester sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah, (2) belum optimalnya pengelolaan dan pelaporan persediaan, (3) belum optimalnya alur pelaporan keuangan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), (4) belum optimalnya penerapan pelaksanaan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang wajib digunakan oleh setiap SKPD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019, (5) belum adanya sosialisasi tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 'Pengelolaan Keuangan Daerah' dan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang 'Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah', (6) belum optimalnya pelaporan anggaran pada APBD yang terkadang tidak terealisasi belanja modalnya dan tidak mencapai target, (7) permasalahan sumber daya manusia yang kurang memadai dan kesulitan dalam penerapan standar baru, sehingga mempengaruhi kinerja instansi dan penyusunan laporannya.

PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah tersebut, Pengguna Anggaran (PA) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD, maka akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan SKPD harus dilakukan secara periodik serta memenuhi prinsip tepat waktu. Pada tahun 2022, SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo belum melaksanakan pelaporan laporan keuangannya dengan tertib karena hanya mengeluarkan laporan keuangan SKPD tahunan. Padahal laporan keuangan SKPD per semester diperlukan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan SKPD per semester juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, guna menilai kondisi keuangan serta menilai efektivitas dan efisiensinya dalam penggunaan anggaran.

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, tercatat ada 27 SKPD di Pemerintah Kota Probolinggo yang dimana setiap tahunnya SKPD dituntut untuk

menyajikan laporan keuangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa SKPD yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan tahunannya. Pada tahun 2021 tercatat beberapa SKPD masih melewati tanggal pelaporan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 900/8070/425.209/2021 yang menyebutkan bahwa batas akhir penyerahan Laporan Keuangan SKPD ke BPPKAD Kota Probolinggo adalah pada tanggal 7 Februari 2022. SKPD tersebut ialah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Pemukiman serta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. Oleh sebab itu pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan SKPD secara berkala, penting untuk dilakukan agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun dan mempercepat penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban dan pelaporan di instansi pemerintah penting untuk ditertibkan.

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu standar yang sangat penting untuk diterapkan dalam akuntansi pemerintahan, tujuannya adalah tak lain untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022) menyatakan bahwa hasil penelitiannya meunjukkan penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Solok. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wina & Khairani, t.t.), yang menunjukkan bahwa standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DISPENDA dan DISHUB. Selain itu, penelitian sebelumnya juga mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dapat mencegah

fraud. (Santoso & Pambelum, t.t.). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Mentari, 2014) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Kejelasan tujuan dan sasaran anggaran dalam roda pemerintahan juga merupakan faktor yang sangat penting, dengan jelasnya anggaran maka akan menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, t.t.) (2020) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022) yang mengemukakan bahwa kejelasan dan tujuan anggaran tidak memiliki efek pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, semakin jelas tujuan dan sasaran anggaran maka tidak akan berdampak pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok.

Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan rangkaian yang penting dalam pelaporan keuangan pemerintahan. Pengawasannya yang ketat akan dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Pamungkas, 2012) yang menyatakan bahwa pola akuntabilitas kinerja yang baik pada instansi pemerintah harus ditunjukkan oleh dukungan pengawasan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin baiknya pengawasan kualitas laporan keuangan pemerintah, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian-penelitian tersebut menguji hubungan antara penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga perlu kiranya untuk meneliti hubungan keempat variabel tersebut dan melakukan kajian ulang terhadap faktor-faktor yang membentuk karakteristik fakta yang terjadi, sehingga dapat menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif. Penelitian ini dapat dilakukan secara lokal, regional, atau nasional.

Berdasarkan latar belakang dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD Pemerintah Kota Probolinggos. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo?
2. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo?
3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo?

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan

standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk pihak yang berkepentingan, temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atau pengimplementasian suatu kebijakan dalam lembaga pemerintah, terutama di SKPD Kota Probolinggo.
2. Bagi akademisi, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan studi yang berkaitan.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, agar penelitian yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuannya, maka dari itu peneliti membatasi penelitian dengan menitikberatkan pada penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Probolinggo tahun 2019-2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Septiani dkk., 2022), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok)	Variabel independen: kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak memiliki efek pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Solok. Dengan kata lain, semakin jelas tujuan anggaran, tidak akan berdampak pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok.
2	(Wina & Khairani, t.t.) 2022. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus DISPENDA Prov, DISPENDA Kota, dan DISHUB Prov)	Variabel independen: penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

		instansi pemerintah.		
3	(Mentari, 2014) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru	Variabel independen: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik dan ketaatan pada peraturan perundangan. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Pengujian pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan pegujian pengaruh variabel pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
4	Reza Zaki Mubarak (2021). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes. (Mubarak dkk., 2021)	Variabel independen: pengawasan internal dan akuntansi sektor publik. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini maka bisa disimpulkan jika variabel pengawasan internal mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes, dan variabel akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes.
5	(Marlena, 2018). Pengaruh Penerapan Standar Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Studi	Variabel independen: penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas	Kuantitatif	Secara parsial dan secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y

	Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMP dan DPRD di Provinsi Bengkulu	pelaporan keuangan. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja pemerintah.		
6	(Gea, t.t.) (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.	Variabel independen: penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7	(Rahmawati & Heliana, 2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Variabel independen: penerapan akuntansi sektor publik. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
8	(Putra, t.t.) (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja	Variabel independen: kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

	Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi).	peraturan perundangan Variabel dependen: akuntabilitas kinerja.		
9	(Santoso & Pabelum, t.t.) (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.	Variabel independen: penerapan akuntansi sektor publik. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
10	(Pamungkas, 2012) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Variabel independen: penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan dan implikasinya. Variabel dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kuantitatif	Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
11	Dayu Jati Sri Panuntun (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas sebagai	Variabel independen: kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.

	Variabel Moderasi Pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Malang.	Variabel dependen: kinerja organisasi sektor publik.		
12	Taufeni Taufik. (2018) Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.	Variabel independen: monitoring dan evaluasi. Variabel dependen: sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Kualitatif	Hasil implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011 masih belum mengembirakan. Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia belum ada yang mendapat nilai memuaskan dan masih banyak ditemukan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan nilai agak kurang dan kurang.
13	Arif Rizki Ramadhani (2018) Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan <i>Good Governance</i> .	Variabel independen: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Variabel dependen: kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan <i>good governance</i>	Kualitaitaif	Disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
14	Amerta Fatma Kusuma, Titik Mildawati. (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap	Variabel independen: akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

	Kinerja Instansi Pemerintah.	Variabel dependen: kinerja instansi pemerintah		.
15	Wiwik Andriani, Irda Rosita, Hidayatul Ihsan. (2017). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Politeknik Negeri Padang.	Variabel independen: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Variabel dependen: <i>good governance</i>	Kuantitatif	Komponen yang dianalisa pada LAKIP PNP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasilnya diperoleh bahwa LAKIP Politeknik Negeri Padang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan di awal.

Sumber: Penelitian terdahulu diolah, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan *Purposive Sampling*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, yaitu pada SKPD Kota Probolinggo dan menggunakan 3 variabel independen, yaitu Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Anggaran, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan. Bukan hanya itu, perbedaan juga ditemui pada variabelnya, karena ketidak konsistennya variabel-variabel pada penelitian terdahulu tersebut, maka dari situlah dipilih variabel

keterbaruan ini. Inilah beberapa perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi berkaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama dalam pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Namun, hal yang masih diragukan adalah apakah terdapat teori akuntansi sektor publik yang mapan. Bahkan, beberapa ilmuwan meragukan apakah sektor swasta yang memiliki perkembangan akuntansi lebih pesat mencakup teori akuntansi yang baik. Untuk mendukung sebuah teori, perlu dilakukan berbagai riset yang menguji hipotesa-hipotesa yang ada. (Pamungkas, 2012)

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT., sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ali Imran (3) ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*”

Makna dari ayat tersebut ialah ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia, bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Objektivitas

Masalah yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan adalah objektivitas. Laporan keuangan digunakan oleh pimpinan guna mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa periode tertentu. Namun, seringkali terjadi masalah dalam objektivitas laporan kinerja yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pihak pimpinan dengan *stakeholder*. Pimpinan tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, melainkan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dan mengamankan posisi mereka, tanpa memandang bahaya yang mungkin terjadi bagi *stakeholder* lain, seperti karyawan dan masyarakat lainnya.

2. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada penggunaan teknik atau metode akuntansi yang sama dalam menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode berturut-turut. Tujuannya adalah agar kinerja organisasi dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Konsistensi dalam menerapkan metode akuntansi sangatlah penting karena organisasi memiliki orientasi jangka

panjang. Sedangkan laporan keuangan hanya mencerminkan kinerja dalam satu periode. Untuk memastikan evaluasi kinerja organisasi yang berkelanjutan oleh pihak eksternal, organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansi yang sama secara berkelanjutan. Dengan demikian, akan terhindar dari terputusnya proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal.

3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik harus bisa dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya dan dengan instansi lainnya yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Namun, kendala dalam mencapai daya banding tersebut terkait objektivitas, dimana semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Selain itu, konsistensi juga sangatlah penting dalam mencapai daya banding yang baik, karena adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi dapat menyulitkan tercapainya daya banding yang efektif.

4. Tepat Waktu

Kendala ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan berkaitan juga dengan proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan. Jika proses ini tidak efisien dan efektif, maka akan memakan waktu yang lebih lama dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, kendala juga dapat terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan dalam proses penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki sistem

pengumpulan dan pengolahan data yang efisien dan efektif serta sumber daya yang memadai untuk menjamin penyajian laporan keuangan tepat waktu.

5. Ekonomis Penyajian Laporan

Menyusun laporan keuangan memerlukan pengeluaran dana. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin mahal biayanya. Keterbatasan finansial dalam penyusunan laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membuat laporan tersebut.

6. Materialitas

Informasi dianggap material apabila informasi tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, atau jika keputusan yang dibuat akan berbeda apabila informasi tersebut tidak tersedia. Namun, penentuan materialitas ini bersifat subjektif dan didasarkan pada pertimbangan profesional yang menggunakan teknik tertentu, bukan hanya selera pribadi.

Standar akuntansi merupakan prinsip dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan untuk melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan dalam penerapan standar tersebut. Penetapan standar akuntansi sangat penting untuk memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tanpa standar akuntansi yang memadai, dapat mengakibatkan rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. Menurut (Mardiasmo, 2017), hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain:

- a. Memberikan panduan tentang informasi yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas suatu organisasi kepada semua pengguna informasi.
- b. Memberikan instruksi dan peraturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian yang hati-hati dan independen ketika menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi dan membuktikan keadilan.
- c. Memberikan panduan tentang data yang perlu dilaporkan yang terkait dengan berbagai variabel yang harus dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, regulasi ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan sosial lainnya.
- d. Menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Laporan keuangan pada sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas pada sektor tersebut. Peningkatan tuntutan akan pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik menyebabkan dampak bagi manajemen pada instansi tersebut dalam memberikan informasi kepada publik, informasi tersebut yaitu informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntansi pada sektor publik. Informasi keuangan hanya berfungsi sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi pada sektor publik seharusnya menjadi alat untuk melaksanakan akuntabilitas secara efektif, bukan tujuan akhir dari sektor publik itu sendiri. Oleh karena itu, akuntansi pada sektor

publik tidak hanya identik dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan saja. Tantangan yang dihadapi oleh akuntansi pada sektor publik adalah bagaimana akuntansi dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memantau akuntabilitas manajemen, politik, dan kebijakan. Menurut (Widya, 2019)) Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Hal yang sama berlaku untuk para stakeholder sektor publik, yang membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi yang memenuhi kebutuhan internal dan eksternal organisasi.

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi dalam akuntansi dan laporan keuangan dianggap bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi yang diperlukan tidak terbatas pada informasi keuangan dan sistem akuntansi organisasi saja. Informasi non-keuangan seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Secara umum, fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan berfungsi sebagai penjamin pengelolaan sumber daya yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa.

- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*). Laporan keuangan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik untuk memantau kinerja, mengevaluasi aktivitas, memberikan dasar untuk mengamati tren dalam kurun waktu tertentu, pencapaian tujuan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan di masa depan, serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- d. Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca menentukan apakah organisasi atau unit kerja dapat melanjutkan penyediaan barang atau jasa di masa depan.
- e. Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak lain yang berkepentingan, serta digunakan organisasi untuk menyampaikan prestasi yang telah dicapai kepada pemangku kepentingan.
- f. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai organisasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui lebih lanjut.

2.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut (Mocharnad Solichin) konteks pengelolaan keuangan publik dan kejelasan sasaran anggaran sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Sasaran anggaran yang jelas dan

spesifik akan memudahkan para pelaksana anggaran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan menetapkan sasaran anggaran yang spesifik, masyarakat dapat lebih memahami alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah dan menilai apakah penggunaan dana tersebut tepat sasaran atau tidak. Kejelasan sasaran anggaran juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik dalam penyusunan anggaran, serta memastikan pelaksana anggaran memahami dan mengimplementasikan sasaran anggaran tersebut dengan tepat. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja terdiri dari:

a. Pengukuran Kinerja

- 1) Memiliki sistem informasi yang memadai
- 2) Adanya pihak eksternal yang *independent*
- 3) Mengukur kinerja yang strategis dengan menggunakan *Key Performance Indicators (KPI)*

b. Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*)

- 1) Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya
- 2) Penerapan efisiensi untuk mencapai penghematan (*savings*)
- 3) Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga

c. Kontrak Kerja

- 1) Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan
 - 2) Kewenangan bagi pihak Kementerian Negara/Lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada
- d. Kontrol Eksternal dan Internal
- 1) Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran
 - 2) Kontrol dilakukan pada input, output, dan outcome
 - 3) Kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan
- e. Pertanggungjawaban Manajemen
- Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, fokusnya terletak pada output dan bukan hanya pada kontrol terhadap input. Oleh karena itu, pertanggungjawaban manajemen menjadi unsur penting dalam pengukuran kinerja dan pelaksanaan anggaran

Menurut (Mentari, 2014) terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menjamin kejelasan sasaran anggaran, yaitu:

1. Tujuan. Tujuan harus dijelaskan secara rinci dan spesifik agar dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang yang bertanggung jawab.
2. Kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Standar. Standar atau target yang ingin dicapai harus ditetapkan. Sasaran harus menantang, tetapi tetap realistis dan dapat dicapai.

4. Jangka waktu. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan harus ditetapkan dan anggaran memiliki periode tertentu untuk membiayai biaya yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan pada jenis anggaran. Periode anggaran biasanya satu tahun.
5. Sasaran prioritas. Prioritas belanja pemerintah daerah harus ditetapkan.
6. Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi. Koordinasi harus diperhatikan agar sumber daya yang tersedia dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kejelasan sasaran anggaran harus dijelaskan secara spesifik dan jelas sehingga setiap orang yang bertanggung jawab dapat memahami tujuan pencapaian anggaran.

2.2.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perusahaan, laporan keuangan memiliki peran penting dan dibutuhkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut (Fandi, 2004), kualitas laporan keuangan adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara menurut (Rafarni Gea et al., 2021), kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi. Laporan keuangan dianggap berkualitas baik jika informasi yang disajikan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya. Menurut pendapat

(Mardiasmo), ciri-ciri laporan keuangan berkualitas adalah dapat memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan harus bermanfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan laporan tersebut. Standar kualitas yang harus dipenuhi adalah:

- a. Mudah dipahami. Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan ekonomi dan bisnis.
- b. Relevan. Informasi keuangan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa depan.
- c. Dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antara periode, sehingga kecenderungan posisi dan kinerja keuangan dapat diidentifikasi.
- d. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan sesegera mungkin, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
- e. Lengkap. Informasi keuangan harus mencakup semua fakta keuangan dan disajikan dengan cara yang tidak menyesatkan pembaca.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan berkualitas adalah informasi yang bermanfaat dan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dianggap baik jika disajikan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban mengenai posisi keuangan perusahaan yang disusun secara

maksimal agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan suatu perusahaan bergantung pada seberapa besar informasi yang disajikan dan dapat berguna bagi semua penggunanya.

2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut penjelasan dari LAN dan BPKP (2000), akuntabilitas kinerja merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah, bagian, atau lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitas yang berkaitan dengan tugas pokoknya masing-masing, karena pertanggungjawaban yang diminta mencakup baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat konsep kepemilikan. Seperti tertera dalam surat Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

Artinya: Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas menurut perusahaan lebih memperhatikan *stakeholde* dan lingkungan dari pada *stakeholder* semata.

Menurut (Rahmawati & Heliana, 2022), akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya ataupun sudah berada di luar kewenangannya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Sistem akuntabilitas harus dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sistem akuntabilitas harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Sistem akuntabilitas harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Sistem akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai kata perubahan manajemen instansi pemerintah melalui pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

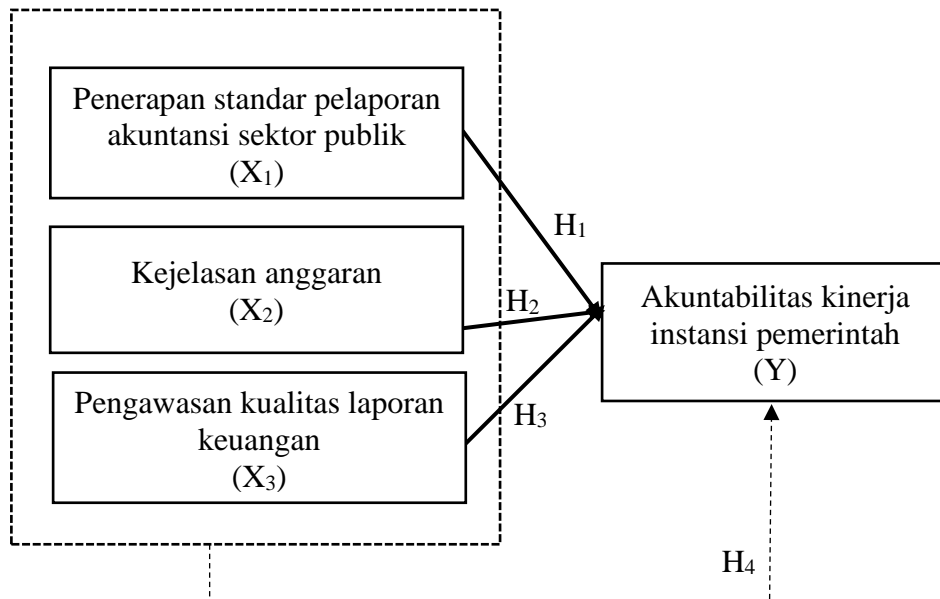
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran visual dan konsep teoritis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor terkait. Untuk dapat menentukan model konseptual, perlu adanya teori-teori yang mendasarinya. Dalam penelitian tentang pengungkapan pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dirumuskan kerangka konseptual yang mencakup semua faktor-faktor tersebut.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Dari gambar di atas, penelitian ini menggunakan variabel independen/bebas/tak terikat (X) yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X_1), kejelasan anggaran (X_2), dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X_3). Sedangkan variabel dependen/tak bebas/terikat (Y) yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Keterangan:

- > Pengaruh Parsial/Signifikan (Uji T)
- - - - -> Pengaruh Simultan/Bersamaan (Uji F)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan terkait perilaku, fenomena, atau situasi tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis merupakan praduga jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang bersifat sementara berdasarkan fakta-fakta empiris. Dengan keterangan H_0 di tolak dan H_a di terima. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan akuntansi sektor publik merupakan penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah, serta pengawasa yang optimal terhadap laporan keuangannya. Laporan keberlanjutan dengan menerapkan standar pelaporan akuntansi terhadap laporan keuangan pemerintahan akan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, hal tersebut dapat diukur menggunakan pola pelaporan keuangannya yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas (Mentari, 2014).

Suatu tindakan yang dapat dilaksanakan guna menelusuri penyimpangan atas anggaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penerapan standar pelaporan akuntansi secara parsial

berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas ini ialah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami syarat bahwa mereka wajib untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik. (Widya, 2019)..

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuntut adanya pengendalian akuntansi sektor publik untuk mengetahui seberapa besar kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan dan yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas di lingkungan sektor publik dapat membantu pemerintahan dalam memberikan informasi dengan lebih cepat, efektif dan efisien kepada publik.

H1: Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran merupakan gambaran kuantitatif dari tujuan-tujuan manajemen dan sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran dapat ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan untuk dipahami dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mentari, 2014) dan (Putra, t.t.) yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan

secara ekonomis, efisien, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran yang baik diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas. Hasil penelitian berbanding terbaik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022) yang mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai bagian penting pada penyelenggaraan pemerintah, sebab laporan keuangan memiliki efek pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai pemberi dan penyedia pelayanan untuk masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setiap organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dimana jika semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi, maka akan menunjukkan kinerja keuangan instansi yang juga baik. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat dari laporan keuangan dibuat secara relevan yang sesuai dengan SAP dan mengandung informasi yang lengkap dan relevan untuk pengambilan keputusan akuntansi, informasi yang disajikan benar dan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna tanpa berpihak

pada kepentingan pihak tertentu, serta berisikan informasi yang dapat dibandingkan, kemudian laporan keuangannya disusun secara sistematis dan mudah dipahami. (Rizki Auliddiah, t.t.)

Menurut (Marlena, 2018) kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan pengawasan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penentuan kualitas laporan keuangan ini dapat diukur dengan pelaporannya yang bersifat transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh sastranegara dan Rizal (2012), yang juga sama-sama meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H3: Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.4 Pengaruh Secara Simultan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, yang diharapkan dapat

membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat berjalan dengan optimal. Kejelasan sasaran anggaran bertujuan untuk mengukur sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Dengan sasaran anggaran yang jelas, maka akan dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Septiani, dkk.)

H4: Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang akan memberikan hasil observasi yang nantinya akan dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo Tahun 2019-2022 yang dinyatakan dalam bentuk angket atau kuisioner.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan (Sugiyono, 2019). Adapun lokasi penelitian ini adalah di SKPD Kota Probolinggo yang terdiri dari Badan dan Dinas. Adapaun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena permasalahan yang diteliti terdapat pada lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, karena lokasi yang dipilih oleh peneliti lebih dekat dengan domisili peneliti, dan pernah menjadi objek pelaksanaan PKL sebelumnya. Sehingga lebih mudah akses dan jangkauan untuk mngetahui atau meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang akan dikaji. Berikut ini adalah SKPD yang menjadi lokasi penelitian:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
6. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja
7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan
8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
13. Dinas Perpustakaan Dan Arsip
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
15. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
16. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.3 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi objek penelitian untuk mengidentifikasi populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo.

B. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik, dengan kata lain beberapa dari populasi, tetapi tidak berarti seluruhnya (Sugiyono, 2019). Proses pada pengambilan sampel dapat dikatakan sebagai proses yang penting, hal ini karena sampel harus akurat dan tepat agar menghasilkan kesimpulan suatu penelitian menjadi sesuai dengan harapan dan tidak menyesatkan (Jogiyanto, 2018). Pemilihan sampel dilakukan jika terdapat kesesuaian antara karakteristik sampel terhadap kriteria pemilihan sampel penelitian. Untuk dapat mempersempit ruang lingkup pada objek penelitian, keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti memilih sampel yaitu pegawai pada bagian akuntansi/keuangan pada SKPD Dinas dan Badan Kota Probolinggo yang berjumlah 18 SKPD. Dan peneliti mengambil 4 sampel pada setiap SKPD.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi, dimana terdiri dari seperangkat karakteristik yang dimiliki populasi secara keseluruhan dan berfungsi sebagai dasar data yang digunakan dalam penelitian. Total sampling mengacu pada seluruh populasi sebagai unit sampel. (Roflin & Liberty, 2021). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara *non probability*,

kemudian untuk metode yang dipilih yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yang berarti dapat dikatakan bahwa penentuan sampel menggunakan pertimbangan melalui kriteria tertentu. Adapaun kriteria responden yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. SKPD Kota Probolinggo yang terdiri dari Badan dan Dinas.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah staf bagian akuntansi/keuangan dan masing-masing SKPD menetapkan 3 orang sebagai responden
- c. Responden ditetapkan oleh Kepala Bagian atau staf pada bagian akuntansi/keuangan pada SKPD

3.5 Data dan Jenis Data

Data merupakan bahan baku yang harus diolah untuk menghasilkan informasi berbasis fakta kuantitatif atau kualitatif (Riduwan, 2008). Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Menurut (Sujarweni, 2014) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, observasi, dan kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Observasi dan wawancara digunakan untuk mencari informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk data kuisisioner digunakan untuk mengetahui data-data mengenai penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan angket kuisisioner. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada 18 SKPD di Kota Probolinggo untuk mendapatkan informasi sekaligus data para responden. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yaitu laporan tentang pengetahuan pribadinya mengenai suatu hal tertentu (Arikunto, 2009). Angket ini dilakukan dengan cara membagikan atau menyebar kuisisioner dengan bertatap muka secara langsung. Kuisisioner yang disebar diukur dengan menggunakan *skala likert* dan bersifat tertutup.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan (Sugiyono, 2019). Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat memengaruhi variabel lain, dan variabel dependen adalah variabel terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen (Sujarweni, 2014).

Peneliti dalam hal ini memilih pengukuran operasional variabel untuk setiap variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor

publik (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_2), dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X_3), sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Tabel 3.1
Oprasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik adalah standar penyusunan laporan pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan dari organisasi atau institusi yang bergerak di sektor publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar pemerintahan 2. Ketepatan 3. Kesesuaian hasil 4. Penyajian laporan keuangan 	Ramadhani, (2009) & Mukarromah, (2021)
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan sepsifik sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Kinerja 3. Sasaran prioritas 4. Koordinasi 	Niswatul (2018) & Made (2021)
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_3)	Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati dan menilai pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Dapat dibandingkan 3. Andal 4. Mudah dipahami 	Octaviani, (2021) & Mukarromah, (2021)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).	Akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dapat pertanggungjawabkan 2. Pencapaian visi, misi dan tujuan 3. Patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 	Niswatul (2018) & Mukhlis (2020)

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

3.8 Skala Pengukuran

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *skala likert*. Variabel akan diukur dengan *skala likert* dengan menjabarkan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik ukur penyusunan butir-butir instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden (Sugiyono, 2019). *Skala likert* dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Penggunaan *skala likert* dapat dijadikan acuan menyusun item-item operasional variabel yang berupa pertanyaan atau pernyataan.

Tabel 3.2

Skala Likert

Ukuran Data	
Skor	Jawaban
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Netral
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2019)

3.9 Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Reliabilitas)

3.9.1 Uji Validitas

Validitas kuisisioner dievaluasi dengan menggunakan uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu angket. Suatu angket dapat dikatakan valid apabila pada kuisisionernya dapat mengungkap suatu hal yang akan diukur. Jika pertanyaan dalam suatu kuisisioner bisa mengungkap informasi yang sebenarnya, artinya kuisisioner tersebut akan

dianggap valid. Untuk mengetahui korelasi antara hasil setiap item pertanyaan dengan hasil keseluruhan, uji validitas ini menggunakan rumus korelasi *Pearson*. Butir-butir soal dianggap valid jika terdapat tingkat korelasi yang signifikan antara skor tiap butir soal pada total skor yang di bawah 0,05. (Signifikansi $< 0,05$). (Arikunto, 2009). Kemudian, dasar pengambilan keputusan yang lain pada uji validitas indikatornya yaitu jika r hitung positif dan nilai r hitung $> r$ tabel, maka variabel tersebut dapat dikatakan valid. Namun jika r hitung tidak bernilai positif dan nilai r hitung $< r$ tabel, maka variabel tersebut dikatakan tidak valid. Dan jika r hitung $> r$ tabel tetapi memiliki nilai yang negatif, maka variabel tersebut juga dikatakan tidak valid.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini termasuk indeks yang memperlihatkan berapa jauh hasil penelitiannya bisa dipercaya. Reliabilitas dianggap sebagai alat pengukuran kuisisioner yang termasuk indikator dari konstruk. Kuisisioner dianggap reliabel jika respondennya yaitu tetap antar waktu. Ketika seseorang menjawab kuisisioner secara konsisten ataupun matang seiring waktu, akan dinyatakan handal ataupun dapat diandalkan. Dilakukannya uji reliabilitas melalui kestabilan koefisien *Cronbach alpha* dalam seluruh konstruk. Sebagai pengukuran reliabilitas penelitian ini mempergunakan uji statistik *Cronbach alpha*. Dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 (*Cronbach alpha* $> 0,06$). (Arikunto, 2009)

3.10 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara kuantitatif yang menggunakan rumus-rumus statistik yang akan disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, guna memperhitungkan angka-angka dan menganalisis data yang diperoleh. Analisis data akan peneliti langsung melalui perhitungan secara manual dengan program statistik, yaitu SPSS (*Statistical Package for the Social Sciens*). Sehingga dengan bantuan perhitungan SPSS, selain prosesnya lebih cepat, hasilnya juga lebih akurat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi data panel yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Riduwan, 2008). Beberapa serangkaian tahapan teknik analisis regresi data panel diantaranya yaitu model regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji kelayakan model).

3.10.1 Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif yaitu perhitungan statistik yang digunakan sebagai alat dalam melakukan analisa data yang digunakan untuk menggambarkan data sampel yang sudah dikumpulkan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil suatu simpulan yang berlaku umum. Penelitian ini menjelaskan kumpulan data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Analisis deskriptif ini tidak berbentuk hubungan maupun perbandingan, karena mempergunakan hanya satu variabel atau juga bisa lebih tetapi dilakukan secara independen. Hipotesis deskriptif diselidiki dalam analisis statistik deskriptif ini.

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai terbaik, linier dan tidak bias dari estimasi yang diperoleh. Oleh karena itu, akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu pada beberapa data yang akan digunakan dalam regresi. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. (Padilah & Adam, 2019).

3.10.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen atau keduanya apakah berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang pengujiannya berdistribusi data normal atau mendekati normal. Distribusi data yang normal berarti memiliki model regresi yang baik. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji *Statistic Non-Parametric Kolmogorov-Smirnov Test* yang terdapat di program SPSS. Teknik *kolmogorov smirnov* memiliki kriteria, data dapat dikatakan normal jika signifikansi lebih besar atau sama dengan toleransi kesalahan yang ditentukan, yaitu diatas 0,05 (Signifikansi $> 0,05$), sedangkan apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Exact Test Monte Carlo* dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang merupakan metode sampling berulang

dengan tujuan untuk mengatasi kumpulan data yang terlalu besar untuk *p-value*, kemudian akan dihitung secara tepat.

3.10.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan pada saat model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas. Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linier antar variabel. Keputusan baik atau tidaknya model regresi, dapat dilihat dari korelasi antar variabel independennya, jika baik maka tidak terjadi korelasi. Untuk menguji terjadi atau tidaknya hal tersebut, dapat dilihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan nilai keduanya, dapat dijelaskan bahwa setiap variabel independen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nilai pada *tolerance* menunjukkan bahwa variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga *tolerance* dengan nilai rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

- Jika *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independent.
- Jika *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

3.10.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian heteroskedastisitas ini, dilakukan menggunakan *Spearman's Rho*. Teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai varians yang tidak

merata dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya. Pada pengujian ini, dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Masalah heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikansi untuk variabel independennya lebih besar dari $> 0,05$ (Sig. $> 0,05$) dan sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari $0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.10.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi termasuk hubungan antar anggota observasi yang dibuat berdasarkan tempat dan waktu. Uji autokorelasi ini dilakukan guna mengetahui apakah terdapat korelasi antar observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Model regresi yang dikatakan baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan pengujian *Durbin Watson*. Suatu data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila $du < dw < 4 - du$.

3.10.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Karena penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka analisis statistik yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara langsung koefisien regresi atau besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu penerapan standar akuntansi sektor publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X3) terhadap variabel terikat yaitu

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Rumus dalam analisis ini sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
α	= Nilai Konstanta
X1	= Penerapan Standar Pelaporan ASP
X2	= Kejelasan Sasaran Anggaran
X3	= Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan
e	= <i>Error</i> (Kesalahan Residual)

3.10.4 Uji Hipotesis (Uji Kelayakan Model)

Hipotesis dinyatakan sebagai pernyataan yang membuat hubungan umum atau khusus antara dua variabel. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial, uji simultan, dan uji keefisien determinasi. Penjelasan ketiga pengujian tersebut antara lain sebagai berikut:

3.10.4.1 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Tujuan dari pengujian ini ialah untuk menguji individual koefisien regresi. *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$) digunakan dalam uji ini. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu:

- Jika nilai pada *t-significance* pada masing-masing variabel $X < 0,05$ maka artinya secara parsial variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Atau jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ menandakan bahwa secara parsial variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Jika nilai pada *t-significance* pada masing-masing variabel $X > 0,05$ maka artinya secara parsial variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Atau jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ menandakan bahwa secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

3.10.4.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel X berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dasar pengambilan keputusan dalam uji f ini yaitu:

- Jika tingkat signifikansi $F < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (X) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika tingkat signifikansi $F > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (X) secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.10.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien daeterminasi (R^2) ini dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kekuatan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini. Uji R^2 ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) dan 1 (satu). Artinya, jika nilai koefisien determinasi adalah 0 atau bernilai kecil maka menyimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi-variasi variabel terikat (dependen) sangat terbatas, atau bahkan tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1, maka menyimpulkan bahwa variabel-variabel bebas (independen) dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dan jika didapati nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai *adjusted R2* dianggap bernilai 0.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Kota Probolinggo merupakan kota dengan sebagian besar penduduknya merupakan Suku Jawa dan Madura. Dan jika dilihat dari segi sosial budayanya, sebagian berasal dari budaya agraris. Kota Probolinggo terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan; Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan; Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan; Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan; dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan. Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang Walikota, yaitu Dr. Habib Hadi Zainal Abidin. Bertempat tinggal di Jl. Lawu No. 39, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dengan kepemimpinannya, tentunya Bapak Dr. Hadi Zainal Abidin memiliki visi dan misi dalam menjalankan pemerintahannya.

Visi dan misi ini merupakan gambaran mengenai masa depan yang akan diwujudkan. Maksud dan tujuan dari visi dan misi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang masa depan Kota Probolinggo sebagai kehendak masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo serta sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan visi dan misi Kota Probolinggo penting untuk dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Visi dimaksudkan sebagai tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan di masa mendatang dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan kristalisasi kehendak antara masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam RPJPD. Adapun visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yaitu “Membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan”.

Sedangkan untuk misi dimaksudkan sebagai sasaran sekaligus alat untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang terangkum dalam visi. Sasaran yang dimaksud tertera dalam RPJPD, yang selanjutnya dijabarkan lebih jelas pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun misi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial
2. Sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas
3. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD merupakan organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. SKPD pada pemerintahan Kota Probolinggo sendiri, terdiri dari beberapa bagian, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berikut ini merupakan data 37 Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Probolinggo:

Tabel 4.1**Perangkat Daerah Kota Probolinggo**

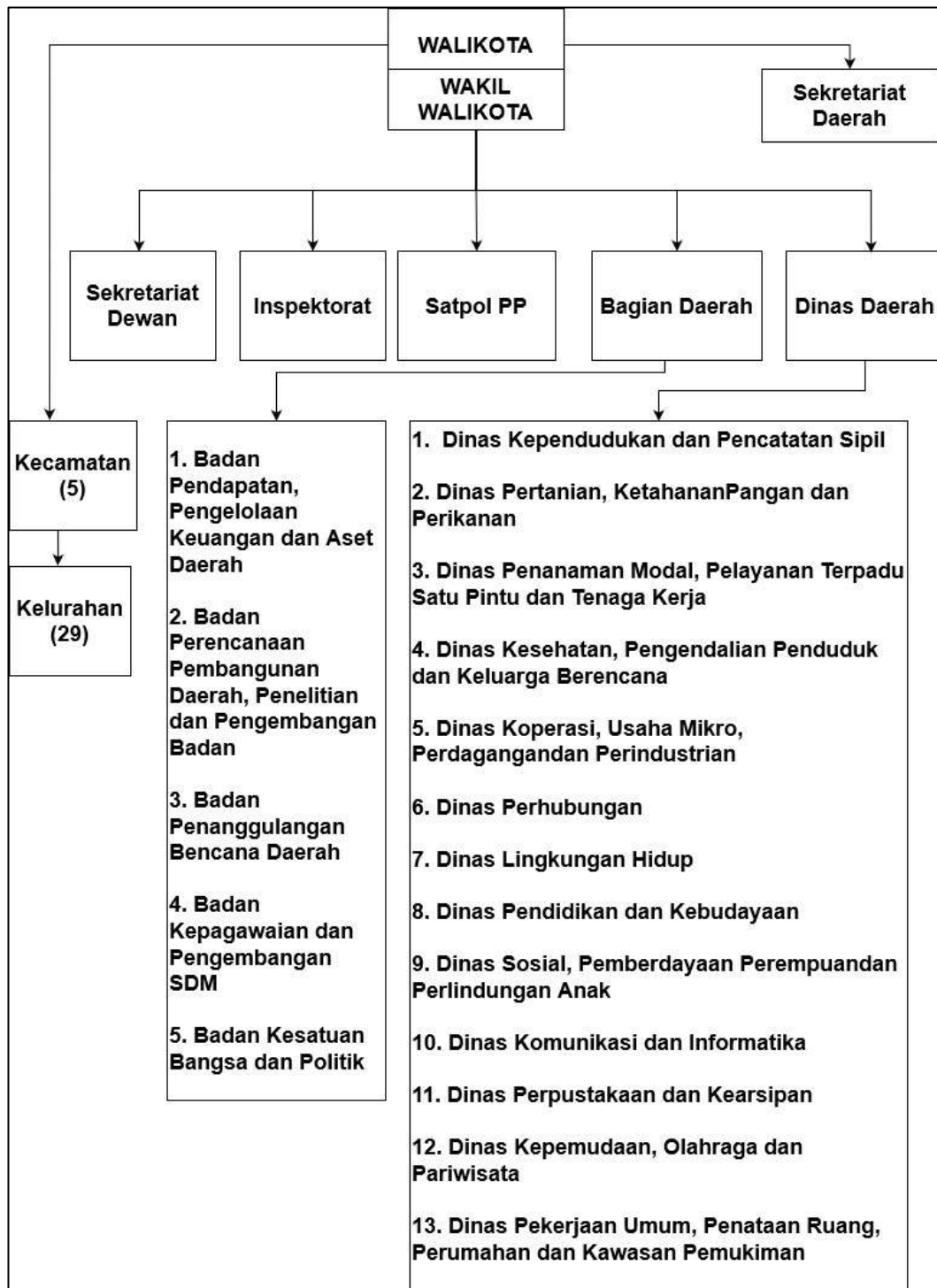
No	Perangkat Daerah	ALAMAT
1	Bagian Umum	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
2	Bagian Pemerintahan	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
3	Bagian Adm Perekonomian dan Pembangunan	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
4	Bagian Hukum	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jl. Ahmad Yani No. 103 Kota Probolinggo
6	Bagian Organisasi	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
7	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
9	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Panglima Sudirman 19 Kota Probolinggo
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl. Soekarno-Hatta No. 52 Probolinggo
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Mastrip, Kedopok, Kota Probolinggo
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jl. Mastrip No 120 Kota Probolinggo
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Mawar No. 39 Kota Probolinggo
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Mastrip 03 Kota Probolinggo
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Jl. Soekarno Hatta No. 265 Probolinggo
16	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Jl. Suroyo No 58 Kota Probolinggo

17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jl. Mastrip No 155 Kota Probolinggo
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jl. Slamet Riyadi Kota Probolinggo
19	Dinas Perhubungan	Jl. Suroyo No 17 Kota Probolinggo
20	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Anggrek No. 15 Kota Probolinggo
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Basuki Rahmat No. 44 Kota Probolinggo
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jl. Soekarno Hatta No. 273 Kota Probolinggo
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Raya Dringu No. 13 Kota Probolinggo
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 5 Kota Probolinggo
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Letjen Sutoyo No. 3 Kota Probolinggo
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Basuki Rahmad No. 20A Kota Probolinggo
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Hayam Wuruk no. 69 Kota Probolinggo
28	Kecamatan Mayangan	Jl. Ikan Paus No. 34 Kota Probolinggo
29	Kecamatan Wonoasih	Jl. Jeruk No 1 Wonoasih Kota Probolinggo
30	Kecamatan Kademangan	Jl. Brantas No. 247 Kota Probolinggo
31	Kecamatan Kedopok	Jl. Mastrip No. 20 Kota Probolinggo
32	Kecamatan Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Kota Probolinggo
33	Sekretariat Dewan	Jl. Suroyo No. 27 Kota Probolinggo
34	RSUD dr. Moch. Saleh	Jl. Mayjen Panjaitan No.65 Kota Probolinggo
35	RSUD Ar Rozy	Jl Prof dr. Hamka Kota Probolinggo
36	Inspektorat	Jl. Hayam Wuruk No. 69 Kota Probolinggo
37	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Panglima Sudirman 23 Kota Probolinggo

Sumber: BAKESBANGPOL Kota Probolinggo

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Probolinggo



Sumber: data yang diolah 2023

4.1.2. Tujuan Pemerintahan Kota Probolinggo

Selain visi dan misi, Pemerintah Kota Probolinggo juga memiliki tujuan demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi, diantaranya yaitu: menciptakan pemerintahan yang profesional, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan melalui BOSDA, menjadikan pelayanan kesehatan Kota Probolinggo sebagai salah satu pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan iklim investasi sebagai peningkat PAD Kota Probolinggo, menciptakan sentra produk olahan rakyat berbasis potensi lokal, memperluas jaringan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mengembangkan kawasan industri, mengembangkan kesenian lokal, menciptakan lingkungan hidup Bestari, dan yang terakhir yaitu menjadikan masyarakat merasa nyaman.

4.1.3 Hasil Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil kuisisioner/angket yang disebar oleh peneliti pada SKPD Kota Probolinggo, diperoleh data sejumlah 54 responden. Penentuan responden sebanyak 54 yaitu dari 18 SKPD Badan dan Dinas yang telah dipilih oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini yaitu staf/pegawai yang bekerja pada bidang akuntansi atau keuangan pada setiap satuan kerja Kota Probolinggo. Dari hasil tersebut, identitas data diri responden dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

4.1.3.1 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan penelitian yang sudah diselenggarakan di SKPD Badan dan Dinas Kota Probolinggo melalui penyebaran kuisisioner, didapatkan data usia pegawai sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Kategori Usia	Jumlah	Presentase
1	< 30	7	12,96 %
2	31-40	10	18,51 %
3	41-50	23	42,59 %
4	51-60	14	25,92 %
Jumlah		54	100 %

Sumber: data yang diolah 2023

Mengacu dari tabel 4.2 bisa kita lihat rentan usia responden pegawai di SKPD Kota Probolinggo untuk usia < 30 tahun sejumlah 12,96 % ataupun 7 orang, untuk 31-40 tahun sejumlah 18,51 % ataupun 10 orang, 41-50 tahun sejumlah 42,59% ataupun 23 orang, dan 51-60 tahun sejumlah 25,9 % ataupun 14 orang.

4.1.3.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang sudah diselenggarakan melalui penyebaran kuisisioner, didapatkan data jenis kelamin responden pegawai di SKPD Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	26	48,1 %
2	Perempuan	28	51,9 %
Jumlah		54	100 %

Sumber: data yang diolah 2023

Mengacu dari tabel 4.3 bisa kita lihat bahwa mayoritas responden pegawai di SKPD Kota Probolinggo adalah perempuan berjumlah 28 orang atau 51,9 % dan untuk responden laki-laki dengan jumlah 26 orang atau 48,1 %.

4.1.3.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tanggapan terhadap kuisioner penelitian yang disebar di SKPD Kota Probolinggo, diperoleh informasi mengenai pendidikan terakhir responden pegawai, yaitu:

Tabel 4.4

Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SMA	0	0 %
2	D1	0	0 %
3	D2	0	0 %
4	D3/D4	19	35,2 %
5	S1/S2/S3	35	64,8 %
Jumlah		54	100 %

Sumber: data yang diolah 2023

Mengacu dari tabel 4.4 bisa kita lihat bahwa pendidikan terakhir responden pada SKPD Kota Probolinggo, yakni D3/D4 sebanyak 35,2 % ataupun sejumlah 19 orang, sedangkan S1/S2/S3 sebanyak 64,8 % ataupun sejumlah 54 orang.

4.1.3.4 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tanggapan terhadap kuisioner penelitian yang disebar di SKPD Kota Probolinggo, diperoleh informasi mengenai latar belakang pendidikan responden pegawai, yaitu:

Tabel 4.5

Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Akuntansi	21	38,9 %
2	Manajemen	9	16,6 %
3	Ilmu Ekonomi	11	20,3 %
4	Hukum	3	5,5 %
5	Teknik	0	0%
6	Dan lain-lain	10	18,5
Jumlah		54	100%

Sumber: data yang diolah 2023

Mengacu dari tabel 4.5 bisa kita lihat bahwasanya jumlah dari responden pegawai di SKPD Kota Probolinggo dengan latar belakang pendidikan Akuntansi adalah sebanyak 38,9 % ataupun sejumlah 21 orang, untuk Manajemen sebanyak 20,3 % ataupun sejumlah 11 orang, untuk Hukum sebanyak 5,5% ataupun sejumlah 3 orang, dan latar belakang pendidikan di luar itu sebanyak 18,5 % ataupun sejumlah 10 orang.

4.1.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini variabel yang diuji yaitu meliputi pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian, variabel tersebut diuji secara statistik deskriptif menggunakan SPSS yang akan menghasilkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil dari statistik deskriptif responden SKPD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSPASP	54	32,00	60,00	48,2778	8,34044
KSA	54	25,00	50,00	41,5000	7,16846
PKLK	54	26,00	50,00	39,5556	7,08084
AKIP	54	25,00	50,00	41,0926	7,36455
Valid N (listwise)	54				

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Jumlah data observasi (n) yang digunakan untuk semua variabel adalah 54, sesuai dengan temuan analisis statistic deskriptif. AKIP (Y) sebagai variabel dependen memperoleh rata-rata sejumlah 41,0926. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai minimum 25, nilai maximum 50 dan standar deviasi 7,36455. Sedangkan untuk PSPASP (X1) memiliki nilai rata-rata 48,2778 dengan nilai minimum 32, nilai maximum 60 dan standar deviasi 8,34044. KSA (X2) memiliki nilai rata-rata 41,5000 dengan nilai minimum 25, nilai maximum 50 dan standar deviasi 7,16846. PKLK (X3) memiliki nilai rata-rata 39,5556 dengan nilai minimum 26, nilai maximum 50 dan standar deviasi 7,08084.

4.1.5 Analisis Data

4.1.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevaliditasan kuisisioner yang digunakan dalam mengukur dan menghasilkan data penelitian dari responden. Adapun data yang baik dijadikan instrument penelitian adalah data yang valid. Validitas sebuah pertanyaan diperlihatkan dari output SPSS dalam tabel. Setiap kuisisioner dianggap valid apabila terdapat tingkat korelasi yang signifikan yaitu kurang dari 0,05. Selain itu uji validitas juga dapat dilihat pada tabel item-total statistik. Data dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang dapat dilihat dari tabel *product moment*. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 54. Sehingga r_{tabel} pada uji validitas penelitian ini yaitu 0,266. Variabel dalam penelitian ini dianggap tidak valid jika r_{hitung} kurang dari 0,266 (r_{tabel}). Variabel dianggap valid bilamana r_{hitung} melampaui 0,266 (r_{tabel}). Adapun hasil uji validitas X1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)

X1			
Item	Pearson Correlation (r_{tabel})	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1.1	0,813	0,000	Valid
X1.2	0,871	0,000	Valid
X1.3	0,950	0,000	Valid
X1.4	0,950	0,000	Valid
X1.5	0,950	0,000	Valid
X1.6	0,950	0,000	Valid
X1.7	0,950	0,000	Valid
X1.8	0,950	0,000	Valid
X1.9	0,929	0,000	Valid
X1.10	0,946	0,000	Valid
X1.11	0,752	0,000	Valid
X1.12	0,822	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa seluruh kuisisioner pada variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) memperoleh signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu, juga didapati nilai r_{hitung} dan r_{tabel} pada uji validitas ini. Hasil perhitungan SPSS tersebut menunjukkan hasil r_{hitung} pada setiap butir angket variabel X1 memperoleh nilai yang melebihi 0,266 ($r_{hitung} > r_{tabel}$), dimana hal tersebut mencerminkan bahwa variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) dinyatakan valid atau layak, dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

X2			
Item	Pearson Correlation (r_{tabel})	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X2.1	0,743	0,000	Valid
X2.2	0,942	0,000	Valid
X2.3	0,846	0,000	Valid
X2.4	0,962	0,000	Valid
X2.5	0,953	0,000	Valid
X2.6	0,937	0,000	Valid
X2.7	0,969	0,000	Valid
X2.8	0,891	0,000	Valid
X2.9	0,840	0,000	Valid
X2.10	0,941	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kuisioner pada variabel X2 memperoleh signifikansi kurang dari nilai 0,05. Dan hasil perhitungan SPSS menunjukkan nilai r_{hitung} melebihi 0,266, sehingga disimpulkan bahwa variabel KSA (X2) dinyatakan valid atau layak, dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Tabel 4.9
Uji Validitas Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3)

X3			
Item	Pearson Correlation (r_{tabel})	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X3.1	0,902	0,000	Valid
X3.2	0,917	0,000	Valid
X3.3	0,900	0,000	Valid
X3.4	0,713	0,000	Valid
X3.5	0,908	0,000	Valid
X3.6	0,930	0,000	Valid
X3.7	0,867	0,000	Valid
X3.8	0,939	0,000	Valid
X3.9	0,931	0,000	Valid
X3.10	0,647	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa seluruh kuisisioner pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3) memperoleh signifikansi senilai 0,000. Nilai ini kurang dari nilai 0,05. ($0,000 < 0,05$) Selain itu, juga didapati nilai r_{hitung} dan r_{tabel} pada uji validitas ini. Hasil perhitungan SPSS menunjukkan nilai r_{hitung} pada setiap butir angket variabel X3 melebihi angka 0,266 ($r_{hitung} > r_{tabel}$), dimana hal tersebut mencerminkan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3) dinyatakan valid atau layak, dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Tabel 4.10

Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Y			
Item	<i>Pearson Correlation</i> (r_{tabel})	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Y1	0,708	0,000	Valid
Y2	0,792	0,000	Valid
Y3	0,829	0,000	Valid
Y4	0,936	0,000	Valid
Y5	0,949	0,000	Valid
Y6	0,916	0,000	Valid
Y7	0,781	0,000	Valid
Y8	0,884	0,000	Valid
Y9	0,789	0,000	Valid
Y10	0,704	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.10 di atas, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memperoleh signifikansi senilai 0,000. Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r_{hitung} melampaui 0,266, dimana hal tersebut mencerminkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dinyatakan valid atau layak dan bisa dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

4.1.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah instrumen yang digunakan agar dapat diketahui keadaan dari alat pengukur yang dipakai. Pada kajian ini suatu data akan dianggap reliabel jika dua ataupun lebih, peneliti pada objek sama dihasilkan data sama juga ataupun dari sekumpulan data jika dibagi menjadi dua memperlihatkan hasil data yang sama, uji reliabilitas penelitian ini mempergunakan metode *Cronbach's Alpha*, tujuannya guna memperlihatkan konsistensi responden saat menanggapi seluruh variabel yang mewakili ukuran satu variabel tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan, dimana melebihi 0,6 nilai *Cronbach's Alpha*. Kian besarnya nilai tersebut, sehingga variabelnya bertambah baik.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach'Alpha</i>	Keterangan
X1	0,973	Reliabel
X2	0,972	Reliabel
X3	0,950	Reliabel
Y	0,973	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel, hal ini dikarenakan nilai *Cronbach'Alpha* lebih besar dari nilai minimal *Cronbach Alpha* yaitu 0,60. Pada uji reliabilitas ini menunjukkan hasil pada variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,973, nilai *Cronbach Alpha* pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) sebesar 0,972, nilai *Cronbach Alpha* pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan (X3) sebesar 0,950, dan untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai *Cronbach* sebesar 0,973. Sehingga keempat variabel dapat dinyatakan reliabel.

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

4.1.6.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk melakukan uji model regresi, bahwa variabel residual berdistribusi dengan normal. Pada penelitian kali ini, uji normalitas data dilaksanakan dengan menggunakan *Exact Test Monte Carlo* dalam uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan *Confidence level* sebesar 99%. Jika hasil *One sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu di bawah 0,05 data residualnya tidak memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.11
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		54	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,01881830	
Most Extreme Differences	Absolute	0,180	
	Positive	0,154	
	Negative	-0,180	
Test Statistic		0,180	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,065 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,049
		Upper Bound	0,061
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1588055206.			

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria uji signifikansi $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), dapat disimpulkan bahwa penelitian ini distribusinya normal. Hal tersebut didasarkan dari hasil pengujian uji normalitas di atas yang menunjukkan bahwa hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,065. Hasil tersebut menandakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

4.1.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi korelasi hampir sempurna di antara variabel bebas. Data yang baik merupakan data yang terbebas dari multikolinearitas. Data yang baik adalah data yang tidak terjadi multikolinearitas. Suatu pengujian dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance di atas 0,1, dan nilai VIF di bawah 10. Dan jika hasil pengujian memiliki nilai sebaliknya dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	0,145	6,874
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,214	4,666
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	0,156	6,427

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Pada tabel 4.12 di atas, terdapat nilai tolerance dari variabel independent yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan yaitu secara berurutan (0.145, 0.214, 0.156). Dan untuk VIF secara berurutan (6.874, 4.666, 6.427). Perolehan ini selaras pada persyaratan multikolinearitas yakni $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$.

4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat kesamaan pada semua variabel penelitian di dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan *Sperman's rho* untuk menguji heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 4.13
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,844	1,386		-0,609	0,545
	Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	-0,061	0,071	-0,070	-0,857	0,395
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,892	0,069	0,868	12,949	0,183
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	0,199	0,082	0,192	2,435	0,195

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Pada tabel 4.13 di atas, diperoleh hasil dari pengujian heteroskedastisitas berupa tidak terdapat variabel X bergejala heteroskedastisitas, dikarenakan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. ($Sig > 0,05$).

4.1.6.4 Uji Autokorelasi

Pada Uji autokorelasi ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan gangguan pada periode tertentu dengan kesalahan gangguan pada periode lainnya. Uji autokorelasi menentukan apakah model regresi memiliki korelasi atau *noise error*. Ketika korelasi terjadi, hal itu menjadi masalah autokorelasi. Autokorelasi tersebut muncul karena pengamatan yang berurutan dilakukan sepanjang periode yang saling terkait satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi tanpa autokorelasi. Untuk melihat apakah ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian dengan *Durbin-Watson* (DW), dengan nilai $D_u < D_w < 4-D_u$. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.14

Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,976	0,952	0,949	1,664	1,661
a. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP					
b. Dependent Variable: AKIP					

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi, dikarenakan nilai $D_u < D_w < 4-D_u$. Nilai D_u dalam pengujian autokorelasi ini ditentukan sesuai dengan data penelitian yaitu sebesar 1,51. Penentuan nilai D_u tersebut dapat dilihat dari tabel *Durbin-Watson*, yaitu dengan sampel data sejumlah 54, maka akan menghasilkan nilai DL sebesar 1,28 dan nilai

Du sebesar 1,51. Du dan DL tersebut dapat dilihat di tabel *Durbin-Watson*. Sedangkan nilai Dw yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* di atas yaitu sebesar 1,661. Dan untuk nilai 4-Du yaitu sebesar 2,49. Perhitungan tersebut diperoleh dari $4 - 1,51$. Sehingga dapat dirumuskan dengan perhitungan $Du < Dw < 4-Du$ atau $1,51 < 1,661 < 2,49$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi, atau terbebas dari autokorelasi.

4.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengolahan data menggunakan metode regresi linear berganda dilakukan dengan berbagai tahap dalam menelusuri korelasi variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas/tidak terikat (independen) yang lebih dari satu dengan variabel terikat/tidak bebas (dependen). Uji regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis-hipotesis pada penelitian., yaitu H₁, H₂, H₃, dan h₄. Berikut ini merupakan hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini

Tabel 4.15
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,787	1,387		-0,567	0,573
	PSPASP	-0,069	0,069	-0,078	-0,992	0,326
	KSA	0,894	0,068	0,871	13,119	0,000
	PKLK	0,204	0,080	0,196	2,539	0,014

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Mengacu pada tabel 4.17 di atas, maka diperoleh bentuk persamaan model regresi linear berganda berupa:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -0,787 + -0,69 + 0,894 + 0,204 + e$$

Melalui persamaan analisis linear berganda di atas, dapat peneliti interpretasikan menjadi:

1. Nilai konstansa (α) memiliki nilai negatif sejumlah -0,787. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika semua variabel independen yang terdiri dari PSPASP (X_1), KSA (X_2), dan PKLK (X_3) bernilai nol, maka nilai AKIP (Y) adalah -0,787.
2. Nilai koefisien pada variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) yaitu sebesar -0,69. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang negatif, atau berlawanan arah antara variabel independen PSPASP dengan variabel dependen AKIP. Jika variabel Penerapan X_1 meningkat sebesar 1, maka variabel AKIP akan mengalami penurunan sebesar -0,069 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya tetap konstan.
3. Nilai koefisien pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) yaitu sebesar 0,894. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif, atau searah antara variabel independen KSA dengan variabel dependen AKIP. Jika variabel KSA (X_2) mengalami kenaikan 1, maka AKIP akan naik sebesar 0,894 atau sebesar 89,4% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan atau tidak berubah.

4. Nilai koefisien pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3) yaitu sebesar 0,204. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif, atau searah antara variabel independen PKLK (Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan) dengan variabel dependen AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Jika Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan mengalami peningkatan sebesar 1, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar 0,204 atau 20,4% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan.

4.1.7.1 Uji Parsial (Uji – t)

Secara individual, uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji t-test. Uji statistik t ini mencerminkan ada atau tidaknya pengaruh secara parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Kriterianya yaitu:

1. Jika nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.
2. Jika nilai sig. > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditentukan nilai T tabel dari jumlah sampel 54 dan dengan taraf signifikan 5%. Yaitu:

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$= t (0,05/2 ; 54-3-1)$$

$$= t (0,025 ; 50)$$

$$= t (2,262)$$

$$= 2,008$$

Tabel 4.16**Uji Regresi Linear Berganda Secara Parsial (Uji T)**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,787	1,387		-0,567	0,573
	PSPASP	-0,069	0,069	-0,078	-0,992	0,326
	KSA	0,894	0,068	0,871	13,119	0,000
	PKLK	0,204	0,080	0,196	2,539	0,014

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

1. Uji hipotesis variabel PSAP (H1) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,326 > 0,05$) atau t hitung $<$ t tabel ($-0,992 < 2,008$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel X1 (penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik) terhadap variabel Y (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
2. Uji hipotesis variabel KSA (H2) memiliki nilai sig lebih dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) atau t hitung $>$ t tabel ($13,119 > 2,008$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X2 (kejelasan sasaran anggaran) terhadap variabel Y (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
3. Uji hipotesis variabel PKLK (H3) memiliki nilai sig lebih dari 0,05 ($0,01 < 0,05$) atau t hitung $>$ t tabel ($2,539 > 2,008$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X3 (pengawasan kualitas laporan keuangan) terhadap variabel Y (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

4.1.7.2 Uji Simultan (Uji – f)

Secara simultan, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji f-test. Uji statistik f ini mencerminkan ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan pada uji simultan ini yaitu:

1. Bila nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y secara simultan.
2. Bila nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditentukan nilai F tabel dari jumlah sampel 54 dan dengan 3 variabel independen. Berikut ini adalah rumus dan perhitungan F tabel dalam uji simultan:

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= f(k ; n-k) \\
 &= f(3 ; 54-3) \\
 &= f(3 ; 51) \\
 &= 0,19
 \end{aligned}$$

Tabel 4.17

Uji Regresi Linear Berganda Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2736,749	3	912,250	331,035	0,000 ^b
	Residual	137,788	50	2,756		
	Total	2874,537	53			
a. Dependent Variable: AKIP						
b. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP						

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Melalui tabel 4.17 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu juga didapati nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel ($331,035 > 0,19$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) yang meliputi penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh simultan (secara bersama-sama) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa persentase pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai determinasi merupakan 0 serta 1. Nilai R^2 yang rendah berarti potensi variabel bebasnya sangatlah rendah. Nilai yang hampir mendekati 1 memiliki arti bahwa semua variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memperkirakan variasi variabel terikat, yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.18

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,976 ^a	,952	,949	1,660
a. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP				

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,952. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel

Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (PSPASP), Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (PKLK) mampu mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 0,952 atau 95,2%. Hasil ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel terikat dengan variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 4,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Peneliti melakukan penelitian ini guna dapat mengetahui pengaruh bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Probolinggo selama tahun 2019-2022. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.16 menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh secara parsial penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,326 (Sig. > 0,05). Selain itu pengaruh negatif ini juga dibuktikan dengan t hitung sebesar -0,992 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo tahun 2019-2022.

Penelitian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Penolakan hipotesis ini disebabkan karena instansi tidak mampu untuk mengoptimalkan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik pada mekanisme pemerintahannya. Pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mentari, 2014) yang mengungkapkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Septiani dkk., 2022), (Marlena, 2018), (Gea, t.t.), dan (Rahmawati & Heliana, 2022), yang mencatat bahwa mekanisme dan analisis akuntansi yang digunakan pada pengelolaan dan masyarakat dengan menerapkan standar pelaporan akuntansi sektor publik yang baik akan mengutarakan secara jelas arah dan tujuan dan masyarakat yang dikelola oleh sektor publik sehingga mampu menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan.

Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik yang kurang disebabkan karena masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan standar akuntansi sektor publik ini. Hal tersebut juga dilandasi faktor adanya pergantian pejabat di daerah yang sangat dinamis, yang mengakibatkan sering terjadinya

mutasi atau pergantian pejabat di Pemda yang dimana sudah mamahami implementasi standar akuntansi sektor publik diganti dengan pejabat yang baru, padahal standar dan kebijakannya baru ditetapkan. Hal ini mengakibatkan pejabat yang baru belum memahami mengenai penerapan standar tersebut.

4.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.16 menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial kejelasan sasaran anggaran, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05). Selain itu pengaruh negatif ini juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 13,119 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,008. Sehingga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo tahun 2019-2022.

Pengaruh positif ini berarti apabila semakin jelasnya sasaran anggaran yang diterapkan di instansi pemerintahan, maka akan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Kejelasan sasaran anggaran ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap laporan keuangan pemerintahan, begitu juga akuntabilitas kerjanya. Sesuai pada yang tertera pada Raperda PKD (Rancangan Peraturan Daerah Pengelola Keuangan Daerah) Kota Probolinggo yang menjelaskan mengenai kebijakan anggaran pemerintah, dan menjelaskan juga bahwa mekanisme dan sasaran anggaran harus dilakukan secara jelas dan runtut. Selain itu, pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen rencana pendapatan dan belanja SKPD digunakan sebagai

acuan dasar dalam penyusunan rancangan APBD juga menjelaskan secara rinci mengenai pelaksana dan pejabatan anggaran pemerintahan. Sehingga jika anggaran di pertanggungjawabkan secara runtut dan jelas, maka akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang baik pula, sehingga laporan keuangan pemerintahan juga akan lebih maksimal. Dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat pula.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra, t.t.) dan (Mentari, 2014) yang mengemukakan hasil pengaruh positif antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja. Kejelasan sasaran anggaran ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anggaran dalam pemerintahan dapat ditetapkan secara jelas dan spesifik. Dengan sasaran anggaran yang jelas akan dapat lebih memudahkan pelaksana anggaran dalam melakukan tanggung jawabnya. Dan ketidakjelasan anggaran ini dapat mengakibatkan pelaksana anggaran menjadi tidak maksimal dalam pekerjaannya. Namun berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022) yang mencatat bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki efek ataupun pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.2.3 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.16 menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05). Selain itu pengaruh positif ini juga didukung dengan t hitung sebesar 2,539 yang

lebih besar dari t tabel sebesar 2,008 sehingga dapat bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo tahun 2019-2022. Hasil pengaruh positif ini berarti apabila semakin tingginya tingkat pengawasan kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan, maka akan semakin meningkatnya juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

Pengawasan laporan keuangan ini dilaksanakan oleh dewan pengawas yang biasa disebut dengan Dewas, dan dibentuk oleh kepala daerah. Pembentukan Dewas ini hanya dapat dilakukan oleh SKPD yang memiliki realisasi pendapatan menurut LRA 2 tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 tahun terakhir. Dewas ini dibentuk untuk mengawasi dan melakukan pengendalian internal oleh pejabat pengelola. Jika pemantauan dan pengawasan laporan keuangan dalam kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik juga dalam keakuntabilitasnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Wina & Khairani, t.t.), (Marlena, 2018) dan (Pamungkas, 2012) yang mengemukakan hasil pengaruh positif antara variabel pengawasan kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, jika pengawasan laporan keuangan instansi pemerintah dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4.5.4 Pengaruh Secara Simultan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi pada uji simultan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($F_{sig} < 0,05$). Dan dapat kita lihat pada kolom F uji simultan, yang menjelaskan bahwa nilai f hitung sebesar 331,035, atau lebih besar dari f tabel yaitu sebesar 0,19 ($331,035 > 0,19$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh ketiga variabel secara bersamaan yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh positif ini berarti apabila semakin tingginya tingkat penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan, maka akan semakin meningkatnya juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Penerapan akuntansi sektor publik dapat dilihat dari penyusunan dan pelaporan keuangannya yang baik dari setiap SKPD pada pemerintahan, dan kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah pelaksana anggaran dalam melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah dapat mengoptimalkan urusan-urusan pemerintah. Sehingga dengan

meningkatkan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Septiani dkk., 2022), (Wina & Khairani, t.t.), (Mubarok dkk., 2021), (Marlena, 2018) yang mengemukakan hasil pengaruh positif secara simultan antara ketiga variabel yaitu penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, jika meningkatkan ketiganya maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel juga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di pemerintah Kota Probolinggo. Hasil uji hipotesis pada penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo. Hal ini berarti semakin tingginya penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, tidak menjamin akuntabilitas kinerjanya instansi pemerintahannya.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo. Hal ini berarti semakin jelasnya tujuan dan sasaran anggaran dalam menjalankan penugasan profesionalnya, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya.
3. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo. Hal ini berarti semakin baiknya pengawasan kualitas laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya.

4. Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif secara simultan/bersamaan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo. Hal ini berarti semakin tingginya penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, saran yang dapat dikemukakan bagi pemerintah daerah, terlebih untuk SKPD Kota Probolinggo adalah diharapkannya untuk dapat memaksimalkan lagi penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dalam pemerintahannya. Dan diharapkan pimpinan dapat lebih paham bahwa alangkah baiknya jika pegawai pada bagian pengelola keuangan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga dapat lebih mudah dalam memahami alur dan prosedur yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintah.

Kemudian saran selanjutnya ditujukan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan wawancara lebih detail lagi pada setiap instansi, tidak hanya merumuskan masalah pada satu instansi saja, tetapi juga mungkin dapat melakukan wawancara terlebih dahulu pada beberapa SKPD terkait permasalahan keuangan yang terjadi pada setiap instansi tersebut, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Cefrida, m. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. 1.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Gea, I. R. (t.t.). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang*.
- Indriantoro, B. S. N. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis* (1 ed.). BPFE.
- Kenis, I. (t.t.). *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial*. 14.
- Kenis, I. (1979). *American Accounting Association: Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attituted and Performance*. American: American Accounting Assosiation.
- Khumaidah, N. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Aggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Malang*. 3.
- Ledvina. (1991). *Accountability, Corruption, and Democracy A Clarification of Consept* (Vol. III). Asian Review Of Public Administration.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. (Pertama). Andi Yogyakarta.
- Marlena, V. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu*.
- Mubarok, R. Z., Rahmawati, T., & Wulandari, H. K. (2021). *Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes*. 2(01).
- Munawar, A. (2006). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Mentari, C. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. JOMFEKOM UNRI, 1 No 2, 65.
- Mocharnad Solichin, S. (2006). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan KOMitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX Padang, IX.
- Pamungkas, B. (2012). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 12(1).
- Putra, P. A. (t.t.). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*.
- Rahmawati, W. R. & Heliana. (2022). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1).
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (t.t.). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*.

- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono dan Solichin;. (2006). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. 2.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwanda, D. (2015). *Sistem Akuntansi Aktual Pemerintah Daerah*. Jakarta : PPM Manajemen.
- Septiani, S., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok)*.
- Riduwan. (2008). *Dasar Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono. (2004). *Prinsip-Prinsip Total Quality Servis* . Yogyakarta: CV. Andi Ofiset.
- Widya. (2019). *Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*. 5.
- Wina, I. P. H., & Khairani, S. (t.t.). *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov)*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/I

Responden Pegawai di SKPD Kota Probolinggo

Dengan Hormat

Berkenaan dengan pelaksanaan penelitian skripsi saya pada Program Studi Akuntansi S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk meluangkan waktunya dalam membantu mengisi kuisisioner penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”**

Kuisisioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan. Perlu Bapak/Ibu/Sdr/I ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I dalam menjawab kuisisioner dengan benar. Dimohon Bapak/Ibu/Sdr/I dapat menjawab seluruh pertanyaan secara jujur, terbuka dan apa adanya. Seluruh data dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/I berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk akademis penelitian semata. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I berikan tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja Bapak/Ibu/Sdr/I di instansi. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan identitas peneliti:

Nama : Nisrina Salsabila

TTL : Trenggalek, 10 Oktober 2000

Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman No. 156 Kota Probolinggo

NIM : 19520092

Program Studi : Akuntansi

No. HP : 082140205269

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/I atas partisipasinya dalam membantu proses penyelesaian penelitian ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Hormat Saya

Nisrina Salsabila

NIM. 19520092

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Usia :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan Terakhir : SMA D1 D2 D2/D3 S1/S2/S3
- Latar Belakang Pendidikan :
1. Akuntansi
 2. Manajemen
 3. Ilmu Ekonomi
 4. Hukum
 5. Teknik
 6. Dan Lain-Lain

KRITERIA RESPONDEN

- d. SKPD Kota Probolinggo yang terdiri dari Badan dan Dinas.
- e. Responden dalam penelitian ini adalah staf bagian akuntansi/keuangan dan masing-masing SKPD menetapkan 3 orang sebagai responden
- f. Responden ditetapkan oleh Kepala Bagian atau staf pada bagian akuntansi/keuangan pada SKPD

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

Berilah (√) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian yang anda pilih

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X₁)

No	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
2	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah mengguankan standar dengan benar sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 71 Tahun 2010					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis akrual untuk mengakui kewajiban					
5	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan dan belanja					
6	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mencatat pendapatan belanja dengan asas bruto					
7	Pada instansi tempat saya bekerja, mengakui belanja saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas					
8	Pada instansi tempat saya bekerja, penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas					
9	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi					
10	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi					
11	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyajikan CALK pada setiap periode pelaporan					
12	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyajikan CALK yang meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan					

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

No	Definisi	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya memahami apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya.					

2	Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara umum cukup jelas dan tidak membingungkan					
3	Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk untuk mencapai sasaran					
4	Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur					
5	Saya dapat mengetahui secara jelas outcome/hasil yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan					
6	Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas					
7	Laporan keuangan di Satuan Kerja ini disusun berdasarkan perencanaan yang komprehensif					
8	Pimpinan dan staf dapat mempertanggungjawabkan hasil dari seluruh program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan					
9	Saya memahami pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan belanja daerah yang dikalsifikasikan dalam format APBD					
10	Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran					

3. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3)

No	Definisi	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk mengoreksi atau mengevaluasi aktivitas keuangan di masa lalu					
2	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, menyajikan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
3	Laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi tempat saya bekerja, dapat digunakan sebagai informasi dalam memprediksi masa yang akan datang					
4	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, disajikan tepat waktu sesuai periode akuntansi					
5	Laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi tempat saya bekerja, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan					
6	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur dan sesuai dengan aktivitas yang terjadi					

7	Laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi tempat saya bekerja, dapat memberikan manfaat untuk penggunaanya					
8	Laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi tempat saya bekerja, dapat dipahami dengan jelas					
9	Laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi tempat saya bekerja, telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti					
10	Prosedur penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh SKPD terkait					

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

No	Definisi	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan					
2	Anggaran yang telah dirancang dan ditetapkan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik					
3	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi bahwa dana dari Pemerintah akan menghasilkan output maksimal					
4	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi bahwa penggunaan anggaran mencapai target dan tujuan publik					
5	Pelaksanaan program-program organisasi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat					
6	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan					
7	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku					
8	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku					
9	Kuantitas kinerja instansi sudah sesuai dengan standar kerja yang diharapkan oleh BPK					
10	Saya mengerjakan suatu pekerjaan dengan penuh perhitungan, cermat dan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan					

Lampiran 2. Rekap Data Jawaban Kuisisioner

1. Data Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)

No	DATA ANGKET VARIABEL X1 (Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik)												
	NOMOR BUTIR ANGKET PERTANYAAN												
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1 JUML
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	44
3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
7	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	42
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
19	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	52
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
31	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	51
32	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	57
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
46	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	38
47	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	33
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
50	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	40
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34
53	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	32
54	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	42

2. Data Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

No	DATA ANGKET VARIABEL X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran)										
	NOMOR BUTIR ANGKET PERTANYAAN										
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TOTAL X2
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	41
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	5	4	2	4	4	4	4	2	4	4	37
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
19	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	45
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	47
32	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	39
33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
42	5	4	4	4	4	4	4	2	4	5	40
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	5	3	2	3	3	5	4	2	5	4	36
47	4	3	2	2	2	3	3	2	4	2	27
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	4	2	2	2	4	4	4	2	4	4	32
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
52	4	3	2	2	2	3	3	2	2	2	25
53	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	27
54	5	4	2	3	3	3	3	2	5	3	33

3. Data Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3)

No	DATA ANGKET VARIABEL X3 (Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan)										
	NOMOR BUTIR ANGKET PERTANYAAN										
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	TOTAL X3
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
7	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2	32
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	44
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
19	4	4	4	2	5	5	5	5	5	2	41
20	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	42
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	5	3	5	1	5	5	5	5	5	2	41
32	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	38
33	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38

39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
42	5	5	5	2	5	4	5	4	4	2	41
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	4	2	4	2	4	3	5	3	4	1	32
47	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	26
48	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	27
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	4	2	4	2	4	2	4	3	3	2	30
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
52	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	26
53	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	28
54	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30

4. Data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	DATA ANGGKET VARIABEL Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)										
	NOMOR BUTIR ANGGKET PERTANYAAN										TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	2	4	4	4	4	4	2	2	2	4	32
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34
10	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	47
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
19	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	47

20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	5	5	5	5	5	4	3	4	2	5	43
32	4	4	3	4	3	3	3	3	3	5	35
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
39	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
42	5	5	2	5	5	5	2	5	4	4	42
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	4	4	4	4	4	2	4	4	3	5	38
47	3	3	2	2	3	2	2	2	2	4	25
48	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	28
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
52	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
53	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
54	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	32

Lampiran 3. Output SPSS

1. Descriptive Test

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSPASP	54	32,00	60,00	48,2778	8,34044
KSA	54	25,00	50,00	41,5000	7,16846
PKLK	54	26,00	50,00	39,5556	7,08084
AKIP	54	25,00	50,00	41,0926	7,36455
Valid N (listwise)	54				

2. Vailidity test

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9
X1.1	Pearson Correlation	1	,923**	,673**	,673**	,673**	,673**	,673**	,673**	,711**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	,923**	1	,735**	,735**	,735**	,735**	,735**	,735**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	,673**	,735**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000

	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	,673**	,735**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	,673**	,735**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.6	Pearson Correlation	,673**	,735**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.7	Pearson Correlation	,673**	,735**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.8	Pearson Correlation	,673**	,735**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.9	Pearson Correlation	,711**	,766**	,910**	,910**	,910**	,910**	,910**	,910**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.10	Pearson Correlation	,680**	,741**	,980**	,980**	,980**	,980**	,980**	,980**	,924**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.11	Pearson Correlation	,610**	,707**	,565**	,565**	,565**	,565**	,565**	,565**	,598**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.12	Pearson Correlation	,646**	,707**	,663**	,663**	,663**	,663**	,663**	,663**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
TOTAL_X1	Pearson Correlation	,813**	,871**	,950**	,950**	,950**	,950**	,950**	,950**	,929**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54

Correlations

		X1.10	X1.11	X1.12	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	,680**	,610**	,646**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	,741**	,707**	,707**	,871**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.6	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.7	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.8	Pearson Correlation	,980**	,565**	,663**	,950**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.9	Pearson Correlation	,924**	,598**	,713**	,929**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.10	Pearson Correlation	1	,565**	,668**	,946**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000

	N	54	54	54	54
X1.11	Pearson Correlation	,565**	1	,871**	,752**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54
X1.12	Pearson Correlation	,668**	,871**	1	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54
TOTAL_X1	Pearson Correlation	,946**	,752**	,822**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
X2.1	Pearson Correlation	1	,712**	,399**	,642**	,667**	,772**	,756**
	Sig. (2-tailed)		,000	,003	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	,712**	1	,825**	,963**	,872**	,822**	,875**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	,399**	,825**	1	,871**	,824**	,687**	,751**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54

X2.4	Pearson Correlation	,642**	,963**	,871**	1	,932**	,851**	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	,667**	,872**	,824**	,932**	1	,875**	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.6	Pearson Correlation	,772**	,822**	,687**	,851**	,875**	1	,980**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.7	Pearson Correlation	,756**	,875**	,751**	,897**	,925**	,980**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.8	Pearson Correlation	,448**	,841**	,876**	,878**	,836**	,769**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.9	Pearson Correlation	,787**	,761**	,512**	,727**	,744**	,849**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X2.10	Pearson Correlation	,737**	,823**	,730**	,880**	,915**	,924**	,940**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54

TOTAL_X2	Pearson Correlation	,743**	,942**	,846**	,962**	,953**	,937**	,969**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54

Correlations

		X2.8	X2.9	X2.10	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	,448**	,787**	,737**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	,841**	,761**	,823**	,942**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	,876**	,512**	,730**	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	,878**	,727**	,880**	,962**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	,836**	,744**	,915**	,953**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.6	Pearson Correlation	,769**	,849**	,924**	,937**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.7	Pearson Correlation	,831**	,831**	,940**	,969**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000

	N	54	54	54	54
X2.8	Pearson Correlation	1	,663**	,767**	,891**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.9	Pearson Correlation	,663**	1	,820**	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54
X2.10	Pearson Correlation	,767**	,820**	1	,941**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,891**	,840**	,941**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
X3.1	Pearson Correlation	1	,793**	,915**	,440**	,961**	,867**	,943**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	,793**	1	,839**	,654**	,790**	,863**	,727**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	,915**	,839**	1	,479**	,915**	,812**	,900**
	Sig. (2-tailed)							
	N	54	54	54	54	54	54	54

	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	,440**	,654**	,479**	1	,400**	,522**	,358**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,003	,000	,008
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	,961**	,790**	,915**	,400**	1	,897**	,982**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.6	Pearson Correlation	,867**	,863**	,812**	,522**	,897**	1	,853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.7	Pearson Correlation	,943**	,727**	,900**	,358**	,982**	,853**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,008	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.8	Pearson Correlation	,909**	,841**	,861**	,496**	,948**	,966**	,895**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.9	Pearson Correlation	,924**	,806**	,877**	,470**	,963**	,955**	,947**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X3.10	Pearson Correlation	,338*	,578**	,398**	,838**	,325*	,459**	,265

	Sig. (2-tailed)	,012	,000	,003	,000	,016	,000	,053
	N	54	54	54	54	54	54	54
TOTAL_X3	Pearson Correlation	,902**	,917**	,900**	,713**	,908**	,930**	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54

Correlations

		X3.8	X3.9	X3.10	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	,909**	,924**	,338*	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,012	,000
	N	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	,841**	,806**	,578**	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	,861**	,877**	,398**	,900**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000
	N	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	,496**	,470**	,838**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	,948**	,963**	,325*	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,016	,000
	N	54	54	54	54
X3.6	Pearson Correlation	,966**	,955**	,459**	,930**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54

X3.7	Pearson Correlation	,895**	,947**	,265	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,053	,000
	N	54	54	54	54
X3.8	Pearson Correlation	1	,982**	,434**	,939**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000
	N	54	54	54	54
X3.9	Pearson Correlation	,982**	1	,388**	,931**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,000
	N	54	54	54	54
X3.10	Pearson Correlation	,434**	,388**	1	,647**
	Sig. (2-tailed)	,001	,004		,000
	N	54	54	54	54
TOTAL_X3	Pearson Correlation	,939**	,931**	,647**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
Y.1	Pearson Correlation	1	,927**	,706**	,785**	,667**	,518**	,343*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,010
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y.2	Pearson Correlation	,927**	1	,788**	,901**	,797**	,653**	,383**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,004

	N	55	55	55	55	55	55	55
Y3	Pearson Correlation	,706**	,788**	1	,846**	,777**	,689**	,585**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y4	Pearson Correlation	,785**	,901**	,846**	1	,923**	,854**	,580**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y5	Pearson Correlation	,667**	,797**	,777**	,923**	1	,896**	,652**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y6	Pearson Correlation	,518**	,653**	,689**	,854**	,896**	1	,666**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y7	Pearson Correlation	,343*	,383**	,585**	,580**	,652**	,666**	1
	Sig. (2-tailed)	,010	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y8	Pearson Correlation	,407**	,466**	,560**	,745**	,831**	,877**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
Y9	Pearson Correlation	,254	,312*	,446**	,585**	,687**	,830**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,062	,020	,001	,000	,000	,000	,000

	N	55	55	55	55	55	55	55
Y10	Pearson Correlation	,109	,252	,403**	,557**	,692**	,687**	,678**
	Sig. (2-tailed)	,430	,064	,002	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,708**	,792**	,829**	,936**	,949**	,916**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55

Correlations

		Y8	Y9	Y10	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	,407**	,254	,109	,708**
	Sig. (2-tailed)	,002	,062	,430	,000
	N	55	55	55	55
Y.2	Pearson Correlation	,466**	,312*	,252	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000	,020	,064	,000
	N	55	55	55	55
Y3	Pearson Correlation	,560**	,446**	,403**	,829**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002	,000
	N	55	55	55	55
Y4	Pearson Correlation	,745**	,585**	,557**	,936**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55
Y5	Pearson Correlation	,831**	,687**	,692**	,949**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55

Y6	Pearson Correlation	,877**	,830**	,687**	,916**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55
Y7	Pearson Correlation	,761**	,768**	,678**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55
Y8	Pearson Correlation	1	,937**	,845**	,884**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55
Y9	Pearson Correlation	,937**	1	,801**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55
Y10	Pearson Correlation	,845**	,801**	1	,704**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,884**	,789**	,704**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55

3. Reliability Test

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,973	12

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,972	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,950	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,973	10

4. Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		54	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,01881830	
Most Extreme Differences	Absolute	,180	
	Positive	,154	
	Negative	-,180	
Test Statistic		,180	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,065 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,049
		Upper Bound	,061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1588055206.

5. Multicollinearity Test

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	,145	6,874
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,214	4,666
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	,156	6,427

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Heteroscedasticity Test

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,844	1,386		-,609	,545
	Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	-,061	,071	-,070	-,857	,395
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,892	,069	,868	12,949	,183
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	,199	,082	,192	2,435	,195

7. Autocorrelation Test

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	,976 ^a	,952	,949	1,664	1,661
---	-------------------	------	------	-------	-------

a. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP

b. Dependent Variable: AKIP

8. Parsial Test (t test)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,787	1,387		-,567	,573
	PSPASP	-,069	,069	-,078	-,992	,326
	KSA	,894	,068	,871	13,119	,000
	PKLK	,204	,080	,196	2,539	,014

a. Dependent Variable: AKIP

9. Simultant Test (f-test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2736,749	3	912,250	331,035	,000 ^b
	Residual	137,788	50	2,756		
	Total	2874,537	53			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP

10. Determination Coefficient Test (Adjust R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,976 ^a	,952	,949	1,660

a. Predictors: (Constant), PKLK, KSA, PSPASP

Lampiran 4. Surat Perizinan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881 Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id	
Nomor	: B-1198/F.Ek.1/PP.00.9/05/2023	26 Mei 2023
Perihal	: Izin Penelitian Skripsi	
Yth. Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo BAKESBANGPOL Jl. Mawar No.39, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 di Tempat		
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.		
Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :		
Nama	: Nisnina Salsabila	
NIM	: 19520092	
Program Studi	: Akuntansi	
Semester	: VIII (Delapan)	
Contact Person	: 082140205269	
Judul Penelitian	: "Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"	
Dosen Pembimbing	: Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A	
Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.		
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Siswanto		
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Dekan Sebagai Laporan, 2. Kabag Tata Usaha, 3. Arsip.		
		



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Mawar No. 39A Telp. (0335) 426436 Fax. (0335) 426436
PROBOLINGGO 67219

Email : bakesbangpol@probolinggokota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 000.9/741/425.206/2023**

DASAR	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo
MENIMBANG	: Surat dari Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-1198/F.Ek.1/PP.00.9/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023
NAMA	: NISRINA SALSABILA
ALAMAT	: Jl Raya Panglima Sudirman 156 Rt 001 Rw 002 Kel/Desa Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo
PEKERJAAN	: Mahasiswa
NOMOR TELPON	: 082140205269
JUDUL PENELITIAN	: Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
BIDANG PENELITIAN	: Ekonomi
LOKASI PENELITIAN	: Terlampir
WAKTU PENELITIAN	: 1 (satu) bulan Mulai Tanggal 29 Mei s/d 29 Juni 2023
STATUS PENELITIAN	: mandiri

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 29 Mei 2023

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PROBOLINGGO**



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196801081994032014

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Wali Kota Probolinggo;
2. Sdr. Camat Mayangan Kota Prob;
3. Sdr. Camat Kedopok Kota Prob;
4. Sdr. Camat Kanigaran Kota Prob;
5. Sdr. Kepala Polsek Mayangan Kota Prob;
6. Sdr. Kepala Polsek Wonoasih Kota Prob;

Lampiran Tempat/Lokasi Penelitian:


1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
6. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja
7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan
8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
13. Dinas Perpustakaan Dan Arsip
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
15. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
16. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lampiran 5. Bukti Konsultasi Bimbingan

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	1 November 2022	Membahas judul yang akan digunakan, dan revisi judul outline	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	20 Februari 2023	Membahas variabel dan hubungan tiap variabel pada kajian pustaka	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	14 Maret 2023	Menambahkan peneliti terdahulu pada bab 2	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	6 April 2023	Revisi judul penelitian menghapus objek pada judulnya karena melebihi 20 kata	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	10 April 2023	Permasalahan pada latar belakang lebih diperjelas dan perbaikan pada kerangka konseptualnya	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	30 Mei 2023	Memperjelas gambaran umum bab 4 pada deskripsi objek penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	12 Juni 2023	Revisi penulisan sub bab dan marapkan tabel-tabel pada bab 4	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	14 Juni 2023	Revisi kesimpulan pada bab 5 untuk menghapus kata hipotesis karena sudah dijelaskan di pembahasan bab 4	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 14 Juni 2023

Dosen Pembimbing


Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

1 of 2 6/20/2023, 9:27 PM

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 7. Hasil Turnitin

Print Bebas Plagiarisme https://access.fe.uin-malang.ac.id/public/print/plagiasi/6841/104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nisrina Salsabila
NIM : 19520092
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	27%	11%	16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juni 2023
UP2M

Zuraidah, M.S.A

1 of 1 6/22/2023, 7:43 PM

Lampiran 8: Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Nisrina Salsabila
Tempat, Tanggal lahir : Trenggalek, 10 Oktober 2000
Alamat Asal : Jl. Panglima Sudirman No. 156 Kota Probolinggo
Alamat Kos : Perum. Gajayana Inside Blok B4, Malang
Telepon/Hp : 082140205269
E-mail : nisrinasalsabila552@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2007 : TK IT Permata Kota Probolinggo
2007-2013 : SD IT Permata Kota Probolinggo
2013-2016 : SMP IT Pelita Kota Probolinggo
2016-2019 : SMA IT Ar-Rahmah Lumajang
2019-2023 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Staff Divisi Entrepreneur Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi UIN Malang Tahun 2021
- Staff Divisi Event Organizer Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kommust UIN Malang Tahun 2022
- Staff Divisi PSDM Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2022